

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Dengan telah dihasilkannya data dan informasi pada hasil penelitian, baik melalui wawancara, telaah dokumen, maupun dengan observasi. Dengan mengacu terhadap rumusan masalah yang telah dibuat dalam penelitian ini, maka dapat disimpulkan

1. Redesain Sistem Perencanaan dan Penganggaran belum optimal dalam rangka memperkuat Penganggaran Berbasis Kinerja disebabkan oleh BPOM beberapa faktor, antara lain:
 - a. Tidak terdapat konsistensi dalam penyusunan Redesain Sistem Perencanaan dan Penganggaran. Hal ini terlihat dari perbedaan penerapan sasaran strategis dan sasaran kegiatan dalam penyusunan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja, sehingga membuat rumusan RSPP tidak memberikan informasi yang jelas dan belum sesuai kaidah-kaidah yang berlaku dalam pedoman RSPP dan kriteria-kriteria indikator instrumen PBK
 - b. Tidak adanya pedoman RSPP yang detil oleh kemenkeu dan Bappenas membuat BPOM dalam mengimplementasikan ruang lingkup redesign sesuai instrumen yang mendukung PBK masih banyak terdapat ketidaktepatan penempatan redesign.
 - c. Belum adanya kerangka logis (*logical framewok*) dalam penyusunan perencanaan jangka menengah (Renstra) BPOM, sehingga saat penerapan RSPP banyak terdapat informasi kinerja dan indikator kinerja berupa sasaran strategis yang tidak terkait dengan sasaran program, yang berdampak tidak adanya output yang menunjang langsung pencapaian sasaran strategis tersebut, dan terdapat sasaran kegiatan yang tidak memiliki anggaran. Padahal dengan adanya RSPP diharapkan informasi kinerja sudah teridentifikasi kebutuhan anggarannya. Penerapan RSPP pada level Rincian Output yang juga belum menggunakan struktur standar biaya, sehingga menyebabkan standar Biaya sebagai salah satu instrumen PBK ada

belum efisien, hal ini terlihat masih terdapatnya fenomena *budgetary slack* dalam proses penyusunan anggaran di awal. Sehingga banyak terdapat anggaran pendukung yang tidak terkait langsung dengan ketercapaian RO, serta diperkuat hasil analisis efisiensi dengan Metode DEA yang memperlihatkan masih banyak satker di BPOM yang belum efisien.

- d. Pada faktor Evaluasi kinerja satker yang tidak efisien terlihat pimpinan satker belum menjelaskan hubungan antara output yang diampu oleh unit terhadap visi dan misi organisasi melalui sasaran strategis yang terdapat di dalam Renstra kepada SDM satker, sehingga pada saat pelaksanaan dan penyusunan RSPP belum memperkuat PBK di satker-satker BPOM.
2. Berdasarkan temuan hasil penelitian pada kesimpulan pertama. Perbaikan redesain sistem perencanaan dan penganggaran dirumuskan untuk mengoptimalkan penerapan RSPP dalam memperkuat PBK di BPOM. perbaikan berisi terkait strategi perbaikan dan penyempurnaan instrumen PBK sesuai kaidah-kaidah RSPP, strategi penggunaan struktur standar biaya dalam meningkatkan efisiensi penggunaan sumberdaya. serta merumuskan model integrasi BSC dengan *logical frameworks dalam perencanaan jangka panjang Renstra BPOM Tahun 2025-2029*

B. Saran

Atas dasar hasil penelitian yang telah dilakukan dan kesimpulan yang dihasilkan maka penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Perlunya komitmen pimpinan dalam mengimplementasikan RSPP dalam proses perencanaan dan penganggaran agar mampu memperkuat penganggaran berbasis kinerja di BPOM. Perbaikan dapat dilakukan melalui dua tahapan yaitu :
 - e. Perbaikan jangka pendek dilakukan dengan redesain ormasi Kinerja Program dan Kegiatan untuk proses perencanaan dan penganggaran Tahun 2024 dan 2025, sesuai kaidah-kaidah RSPP. Redesain dilakukan terutama dengan membatasi jumlah sasaran kegiatan agar tidak melebihi jumlah sasaran program, dan memilih sasaran kegiatan yang benar-bener mendukung pencapaian sasaran program.

- f. Solusi jangka panjang, adalah melakukan integrasi BSC ke dalam Logical framework penyusunan Renstra BPOM Tahun 2025-2029.
2. Agar dapat meningkatkan efisiensi dalam perencanaan dan pelaksanaan anggaran, BPOM agar menggunakan Struktur Standar Biaya, dan lebih banyak mengusulkan Standar Biaya Keluaran, baik itu Standar Biaya Keluaran Umum maupun Standar Biaya Keluaran Khusus. Penggunaan Struktur Standar biaya akan memperjelas hubungan biaya langsung dan biaya tidak langsung terhadap pencapaian suatu output.
3. BPOM dalam evaluasi kinerja agar melakukan analisis kelebihan dan kekurangan dalam pencapaian target kinerja, dilengkapi dengan tools evaluasi kinerja dengan menggunakan Model EFQM. Model evaluasi kinerja EFQM bisa memotret dari faktor kriteria kinerja (*enablers*) (kepemimpinan, SDM, kebijakan dan strategi, kemitraan dan Sumberdaya, proses) faktor kriteria hasil (*results*) kepuasan pelanggan, kepuasan SDM, dampak terhadap masyarakat, dan hasil kinerja utama. Sehingga evaluasi yang dihasilkan komprehensif dan bisa menjadi dasar untuk pengambil kebijakan dalam memutuskan kebijakan ke depannya.
4. BPOM dalam perancangan Renstra 2025-2024 agar berkolaborasi dengan para pemangku kepentingan, seperti pelaku usaha, masyarakat dan stakeholder terkait, agar tujuan dan sasaran strategis yang di rumuskan bisa memenuhi harapan publik. Kolaborasi dilakukan dengan mengadakan FGD dalam bentuk konsultasi publik, masing-masing unit eselon 1 menjangking masukan melalui kanal-kanal media yang ada, bisa melalui pertemuan langsung, pertemuan daring dan bisa menyebarkan kuisisioner kepada masyarakat dan pelaku usaha. Kolaborasi dengan para pakar juga dilakukan dengan membentuk tim pakar yang bisa berisikan pakar-pakar kebijakan, akademisi, pakar kesehatan, ekonomi, hukum, dll yang terkait dengan tuisi BPOM.

Selain beberapa hal diatas, peneliti juga membuat *policy brief* yang ditujukan kepada Kepala Badan POM, dalam rangka peningkatan penganggaran berbasis kinerja di BPOM. Sedangkan untuk ilmu pengetahuan peneliti menyarankan untuk penelitian selanjutnya untuk melengkapi penelitian ini dengan memperhatikan alokasi anggaran pemerintah dalam bentuk dana alokasi khusus (DAK), karena dalam RSPP salah satu

tujuannya adalah mensinkronkan Belanja Pemerintah dan Pemerintah Daerah terutama penggunaan dana alokasi khusus (DAK) dan dana alokasi umum (DAU).



**POLITEKNIK
STIA LAN
J A K A R T A**

Daftar Pustaka

- Achir, M. A. (1975). *Masalah Pengurusan Keuangan Negara, Suatu Pengantar Teknis*. Bandung: Yulianti.
- Agung Wasono, M. M. (2018). *Tinjauan Kritis Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan di Indonesia*. Jakarta: Bappenas.
- Al Imran, M. N. (2022). Analisis Faktor –Faktor Yang Menyebabkan Inkonsistensi Perencanaan Dan Penganggaran Pada Badan Perencanaan Dan Pembangunan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2018-2020. *Jurnal Progres Ekonomi Pembangunan (JPEP)*, 25-38.
- Anggara, S. (2012). *Ilmu Administrasi Negara, Kajian Konsep, teori, dan fakta dalam upaya menciptakan good governance*. bandung: CV Pustaka Setia.
- Anggara, S., & Sumatri, L. (2016). *Administrasi Pembangunan: Teori dan Praktek*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Antono, f. E., & Virdayanti, K. C. (2018). *Selected Issues in Strategic Planning of Public Sector in Indonesia* . Jakarta: Bappenas Working Papers.
- Ardhyaningtyas, Oflah, S. T., & Zunaidi, A. (2023). Informasi Kinerja Kementerian Kesehatan Berdasarkan Redesain Perencanaan dan Penganggaran. *Jurnal Anggaran dan Keuangan Negara Indonesia*, 41-56.
- Bappenas. (2018). *Simpul Perencana* (Vol. 31). Jakarta: Pusbindiklatren Bappenas.
- Behn, R. D. (2003). Why Measure Performance? Different Purposes Require Different Measures. *Public Administration Review*, 586-606.
- Bungin, B. (2011). *Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Kencana.
- Caiden, N. (2017). Public Budgeting Amidst Uncertainty and Instability. In J. Shafritz, & A. C. Hyde, *Classics Of Public Administration; Eight Edition* (p. 410). Boston: Cengage Learning.
- Chandler, R. C., & Plano, J. c. (1988). *The Public Administration Dictionary*. California: Clio Press.
- Charnes, A., Cooper, W. W., & Rhodes, E. (1978). Measuring efficiency of decision making unit. *European Journal of Operational Research* 2, 429-444.
- Coelli, J. T., Rao, D. P., O'Donnel, C. J., & Battese, G. E. (2005). *An introduction to effieciency and productivity: Second edition*. USA: Springer.
- Conyers, D., & Hills, P. (1984). *An introduction to development planning in the third world*. Scotland: The bath Press, Avon.
- Darto, M. (2011). Integrasi sistem Perencanaan, Penganggaran dan manajemen Kinerja : Sebuah Best Practice di Bank Indonesia. *Jurnal Borneo Administrator*.
- Djamhuri, A., & Mahmudi, M. (2006). New Public Management, Accounting reform, and Institutional perspective of public sector Accounting in Indonesia. *Jurnal Bisnis dan Akuntansi*, 301-321.

- Donvito, P. A. (1969). *The essentials of a Planning Programming Budgeting System*. California: The Rand Corporation.
- Douglas, P. C., & Wier, B. (2000). Integrating ethical Dimensions into a Model of Budgetary Slack creation. *Journal of Business Ethics*, 267-277.
- DPD RI. (2022, 11 09). Retrieved from www.dpd.go.id:https://www.dpd.go.id/jakarta/berita/ketua-dpd-soroti-kinerja-bpom-soal-puluhan-obat-sirop-yang-punya-izin-edar-ditarik
- Drury, C. (2012). *Management and Cost Accounting Eight Edition*. United Kingdom: Brendan George.
- Dunk, A. S. (1993). The Effect of Budget Emphasis and Information Asymmetry on the Relation between Budgetary Participation and Slack. *THE ACCOUNTING REVIEW Vol. 68, No. 2*, 400-410.
- Gaebler, T., & Osborne, D. (1992). *Reinventing government*. Plume. New York: Routledge.
- Gay, L. R., Mills, G. E., & Airasian, P. (2012). *Educational research : competencies for analysis*. New jersey: Pearson Education, Inc.
- Geddes, P. (1904). *Civics: as Applied Sociology*. Retrieved from guttenberg.
- Goedhart, C. (1963). *Garis-garis Besar Ilmu Keuangan Negara:Terjemahan Ratmoko*. Jakarta: Jambatan.
- Gonzalez,et al. (2019). Use of the EFQM excellence model to improve hospital pharmacy. *Research in Social and Administrative Pharmacy*.
- Hansen, D. R., & Mowen, M. M. (2007). *Managerial Accounting, Eighth Edition*. USA: Rob dewey.
- Hatry, H. P. (1999). *Perfomance Measurement: Getting Results*. USA: University Press Of America.
- Hilton, R. W., Maher, M. W., Selto, F. H., & Sainty, B. J. (2001). *Cost management : strategies for business decisions*. Kanada: McGraw-Hill ryerson Limited.
- Holzer, M., & Schwester, R. W. (2011). *Public Administration : An Introduction*. New york: Routledge.
- Hood, C. (1991). *A Public Management For All Seasons*. London: Royal Institute.
- Irawan, S. A. (2020). Pengukuran Efisiensi Kinerja Anggaran Kementerian/Lembaga Menggunakan Data Envelopment Analysis (DEA). *Jurnal Anggaran dan Keuangan Negara Indonesia (AKURASI) Vol. 2 No. 1*, 43-56.
- Irawan, S. A. (2020). Pengukuran Efisiensi Kinerja anggaran Kementerian/Lembaga Menggunakan Data Envelopment Analysis (DEA). *Jurnal Anggaran dan Keuangan Negara Indonesia (AKURASI)*, 43-56.
- Kaplan and Norton. (1992, january-february). The Balanced Scorecard: Measures that Drive Performance. *harvard Bussiness Review 70 No 1*, pp. 71-79.

- Karunia, R. L., & Maburur, A. (2023). *akutansi Pemerintahan: Konsep dan Praktik di Pemerintah Pusat dan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat.
- Kelly, J., & Wanna, J. (2000). New Public Management And The Politics Of Government Budgeting. *International Public Management Review*, 33-55.
- Kemenkeu. (2021, Juli). *Kemenkeu*. Retrieved from <https://anggaran.kemenkeu.go.id/>: <https://anggaran.kemenkeu.go.id/in/post/penandatanganan-nota-kesepahaman-bersama-antara-kemenkeu-&kementerian-ppnbappenas>
- Knowlton, L. W., & Phillips, C. C. (2013). *The Logic Model Guidebook Better Strategies for Great Results*. London: Sage.
- Kristiyanti, M. (2012). Peran Indikator Kinerja Dalam Mengukur Kinerja Manajemen. *Majalah Ilmiah INFORMATIKA Vol. 3 No. 3, Sept*, 103-123.
- Kurniasih, F. N., & Widayanti, W. (2023). REDESAIN PERENCANAAN PENGANGGARAN KEUANGAN UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG. *Jurnal STIE Semarang*, 45-55.
- Last, M. R. (2009). *A Basic Model of Performance-Based Budgeting*. IMF.
- Madjid, N. C. (2020). Redesain Sistem Perencanaan Penganggaran: Tantangan Mewujudkan Perencanaan dan Penganggaran yang Efektif dan Efisien . *Simposium Nasional Keuangan Negara 2020* (p. 1075). Jakarta: Kemenkeu.
- Mahmudi. (2003). New Pbulic Management (NPM): Pendekatan Baru Manajemen Sektor Publik. *sinergi Kajian Bisnis dan manajemen*, 69-76.
- Mardiasmo. (2018). *Akutansi Sektor Publik*. Yogyakarta: CV. Andi Offset.
- Mc Laughlin, K., Osborne, s. P., & Ferlie, E. (2022). *New Public Management: Current trends and future prospects*. London: Routledge.
- Mihaiu, D. M., Opreana, A., & Cristescu, P. M. (2010). Efficiency, Effectiveness and Performance of the Public Sector. *Romanian Journal of Economic Forecasting*, 132-147.
- Milles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). *qualitative data analysis: a methods sourcebook*. USA: Sage Publications. Inc.
- Mimba, N., & Widanaputra, A. (n.d.). The influence of participative budgeting on budgetary slack in composing local governments' budget in Bali province.
- Muhammad. (2019). *Pengantar Ilmu Administrasi Negara*. Lhokseumawe: Unimal Press.
- Mulyono, A. A., & Hertianti, A. (2019). Penerapan Penganggaran Berbasis Kinerja Dalam Rangka Mewujudkan Good Financial Governance. *Jurnal Riset akutansi dan Keuangan*, 7.
- Ningsih, S., Wirahadi, A., & Amy, F. (2018). Analisis Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja dengan Konsep Money Follow Program Dalam Perencanaan dan Penganggaran Kota Padang. *Jurnal Akuntansi & Manajemen*, 1-16.

- Nurlaeli, A. (2020). Perencanaan Pembiayaan Berbasis Planning Programming Budgetting System (Ppbs) Di Sekolah Dasar Islam Terpadu Anni'mah Bandung. *Jurnal Islamic Education Manajemen*.
- Osborne, S. P., & Ferlie, E. (2002). *New Public Management Current trends and future prospects*. USA: Routledge.
- Parhusip, B. (2018). Implementation Of Medium Term Expenditure Framework (Mtef) In Indonesia. *Prosiding Simposium Nasional Keuangan Negara Vol 1 No 1*: 958-977.
- Pecar, Z. (2001). Performance Analysis and Policy Transfer as Preconditions of Successful PA Reform in Slovenia. *NISPAcee Occasional Papers 2, no. 4*, 27-42.
- Precilia, N. P., & Mimba, N. (2020). Pengaruh Partisipasi Anggaran, Kejelasan Sasaran Anggaran dan Kohesivitas Kelompok terhadap Senjangan Anggaran. *E-Jurnal Akuntansi*, 30(9), 2381-2391.
- Purwandari, A. K., Adib, N., & Amirya, M. (2023). Analysis of Budgetary Slack Trigger in Government Institutions (Case Study at Bureau X Ministry of Y). *International Journal of Social Science And Human Research*, 3576-3582.
- Ramanathan, R. (2003). *An introduction to data envelopment analysis: a tool for performance measurement*. London: Sage Publications.
- Robinson, M. (2013). Performance Budgeting. In R. H. Richard Allen, *The International handbook Of Public Financial Management* (p. 237). New York: palgrave Macmillan.
- Robinson, M., & Last, D. (2009). *A Basic Model Of Performance Based Budgeting*. IMF: IMF.
- Robinson, M., & Last, D. (2009). *A Basic Model of Performance-Based Budgeting*. IMF.
- Ruslan, R. (2008). *Etika kehumasan konsepsi dan aplikasi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sajiah, F. S., & Saputra, D. (2019). Efisiensi Belanja Kesehatan Di Indonesia : Pendekatan Two-Stage Network DEA. *Jurnal Anggaran dan Keuangan Negara Indonesia (AKURASI) Vol.1 No 2*, 97-113.
- Sajiah, F. S., & Saputra, D. (2019). Efisiensi Belanja Kesehatan di Indonesia: Pendekatan Two-Stage Network DEA. *Jurnal Anggaran dan Keuangan Negara Indonesia (AKURASI)*, 97-113.
- Sanjaya, W. (2008). *Perencanaan dan desain Sistem Pembelajaran*. Jakarta: Kencana.
- Schick, A. (2017). The Road To PBB: The Stages of Budget Reform. In j. M. Shafritz, & A. C. Hyde, *Classics of Public administration: eight edition* (pp. 203-230). USA: Cengage Learning.
- Seknas Fitra. (2021). *Laporan Riset Implementasi Sinkronisasi Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional*. Jakarta: Seknas Fitra.

- Seknas Fitra. (2021). *Policy Brief Sinkronisasi Perencanaan dan penganggaran*. Jakarta: Knowledge Sector Initiative.
- Setiadi, h. (2014). *Teori Perencanaan*. Tangerang Selatan: Universitas Terbuka.
- Setianingsih, T. (2019). Analisis Penerapan Model EFQM dalam menilai Manajemen Mutu Puskesmas di 8 Propinsi di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Kesehatan Medika drg Suherman*.
- Silitonga, M. S. (2018). *Corruption in Indonesia*. Holland: Univeristy of Groningen.
- Spradley, J. P. (1980). *Participant observation*. USA: Holt, Rinehart and Winston, Inc.
- Sudarmanto. (2015). *Kinerja dan Pengembangan Kompetensi SDM: Teori, Dimensi, Pengukuran, dan Implementasi dalam Organisasi*. Pustaka Pelajar.
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suhartono, E., & Solichin, M. (2006). Pengaruh kejelasan sasaran anggaran terhadap senjangan anggaran instansi pemerintah daerah dengan komitmen organisasi sebagai pemoderasi. *Simposium nasional akuntansi 9 padang*. padang.
- Supardi. (2005). *Metodologi penelitian ekonomi & bisnis*. UII Pres.
- Suyanto, B., & Sutinah. (2005). *Metode Penelitian Sosial Berbagai Alternatif Pendekatan*. Jakarta: Kencana.
- Tjokroamidjojo, B. (1985). *Perencanaan Pembangunan*. Jakarta: PT Gunung Agung.
- Togerson, D. J., & Palmer, S. (1999). Economic notes: definitions of efficiency. *The BMJ*, 1136.
- Trick, M. (1996). Data envelopment analysis for consultants. *Mon Nov, 11(15)*, , 33-53.
- Waldo, D. (1972). Developments in public administration. *The Annals of the American Academy of Political and Social Science*, 217-245.
- Warsono, H., Astuti, R. S., & Marom, A. (2019). *Buku Ajar Teori Administrasi*. Semarang: UNDIP.
- Watson, P. A., & Chileshe, N. (2003). Deploying and scoring the European Foundation for Quality Management Excellence Model (Part One). In *2nd International Structural Engineering and Construction Conference,(ISEC-02) (Vol. 1)*, (pp. 1595-1598). United Kingdom.
- Widyastuti, P., & Nurwahyuni, A. (2022). Analisis Efisiensi Relatif di Unit Pelaksana Teknis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2019. *Jurnal Ekonomi Kesehatan Indonesia*, 6(2).
- Wrihatnolo, r. R., & Nugroho, R. (2006). *manajemen pembangunan Indonesia sebuah pengantar dan panduan*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
- Young, S. M. (1985). Participative Budgeting: The Effects of Risk Aversion and Asymmetric Information on Budgetary Slack. *Journal of Accounting Research*, Vol. 23, 829-842.
- Yuesti, A., Dewi, N. S., & Pramesti, I. A. (2020). *Akutansi Sektor Publik*. Denpasar: CV. Noah Aletheia.

- Yulianto, j. r., Lestari, N. A., Hartanto, & Febrianto, A. M. (2020). Evaluasi Penerapan Kebijakan Standar Struktur Biaya: Penggunaan Konsep Biaya Utama Dan Biaya Pendukung. *Jurnal Anggaran dan Keuangan Negara Indonesia (AKURASI) Vol. 2 No. 1*, 22-42.
- Yuslely Usman, Ni Ketut Aryastami, harimat Hendarwan. (2008). Penerapan European Foundation For Quality Management (EFQM) di Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota Untuk meningkatkan Kinerja Dinas. *Buletin Penelitian Sistem Kesehatan*, 19-32.
- Indonesia, (2003). Undang-Undang nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Jakarta
- Indonesia, (2004). Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Jakarta
- Indonesia, (2007). Undang-undang republik indonesia Nomor 17 tahun 2007 Tentang Rencana pembangunan jangka panjang nasional Tahun 2005–2025. Jakarta
- INDONESIA, (2004). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2004 Tentang Penyusunan Rencana Kerja Dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga. Jakarta
- Indonesia, (2017). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional. Jakarta
- Indonesia, (2023). Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran. Jakarta
- Indonesia, (2017). Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2017 Tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan. Jakarta
- Indonesia, (2019). Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020-2024. Jakarta
- Indonesia, (2020). Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020-2024. Jakarta
- Indonesia, (2021). Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Jakarta
- Indonesia, (2021). Peraturan Menteri Keuangan Nomor 140/PMK.02/2021 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 195/PMK.02/2014 tentang Standar Struktur Biaya

- Indonesia, (2020). Surat Edaran Bersama No S-122/MK.2/2020 B-517/M.PPN/D.8/PP.04.03/05/2020 Tentang Pedoman Redesain sistem Perencanaan dan Penganggaran. Jakarta
- Indonesia, (2021). Peraturan Menteri Keuangan Nomor 22/PMK.02/2021 Tahun 2021 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga. Jakarta
- Dasar-dasar Teori Perencanaan <http://repository.ut.ac.id/4330/2/PWKL4308-M1.pdf>. Diakses 08 November 2022
- Negara, L. A. (2008). Hukum Administrasi Negara. Bahan Ajar Diklatpim Tk. III. Lembaga Administrasi Negara–Republik Indonesia. Jakarta
- DPD RI. (2022, 11 09). Retrieved from www.dpd.go.id: <https://www.dpd.go.id/jakarta/berita/ketua-dpd-soroti-kinerja-bpom-soal-puluhan-obat-sirop-yang-punya-izin-edar-ditarik>
- <https://kpbu.kemenkeu.go.id/read/21-18/pjpk/persyaratan-proyek/value-for-money-vfm> diakses tanggal 09 desember 2022
- <https://www.jurnal.id/id/blog/arti-value-for-money-manfaat-cara-mengukurnya-sbc/>. Diakses tanggal 07 Desember 2022
- Jokowi Minta RKP 2022 Disesuaikan dengan Tantangan Pandemi (cnnindonesia.com). Diakses 09 November 2022
- Modul Konsep dasar Penganggaran <https://pustaka.ut.ac.id/lib/wp-content/uploads/pdfmk/EKAP4403-M1.pdf>. Diakses 08 November 2022

POLITEKNIK
STIA LAN
JAKARTA

DMU	Score	Rank	Benchmark (lambda)	Slack Movement (Penyerapan)	Slack Movement (Konsistensi)	Slack Movement (CRO)	Slack Movement (NE)	Slack Movement (Kinerja)	Projection (Penyerapan)	Projection (Konsistensi)	Projection (CRO)	Projection (NE)	Projection (Kinerja)	Dual Price (Penyerapan)	Dual Price (Konsistensi)	Dual Price (CRO)	Dual Price (NE)	Dual Price (Kinerja)
BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN PALU		1	1 BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN PALU(1)	0	0	0	0	0	99.48	99.96	100	51.7	86.13	-1,20E+03	-2,07E+03	-5,00E+03	-3,35E+03	1,16E+04
BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN MAKASSAR	0.999934	63	BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN BANJARMASIN(0.031734)															
BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN KENDARI	0.999967	47	DEPUTI I BIDANG PENGAWASAN OBAT NARKOTIKA PSIKOTROPIKA PREKURSOR DAN ZAT ADIKTIF(0.027266)															
BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN AMBON	0.999978	41	BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN BANJARMASIN(0.004789)															
BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DENPASAR	0.999995	34	BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN BANJARMASIN(0.513723)															
BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN MATARAM	0.999979	39	BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN SOFIF(0.271697)															
BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN KUPANG	0.999915	74	BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN BANJARMASIN(0.236795)															
BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN JAYAPURA	0.999943	56	BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN BANJARMASIN(0.187582)															
BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN BENGKULU	1	1	1 BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN BENGKULU(1)	0	0	0	0	0	99.92	99.53	100	54.48	86.89	-9,59E+02	-2,09E+03	-5,17E+02	-3,29E+03	1,15E+03
INSPEKTORAT UTAMA BADAN POM	1	1	1 INSPEKTORAT UTAMA BADAN POM(1)	0	0	0	0	0	99.82	89.46	100	74.55	90.79	-5,89E+02	-1,05E+04	0	0	1,10E+04
DEPUTI I BIDANG PENGAWASAN OBAT NARKOTIKA PSIKOTROPIKA PREKURSOR DAN ZAT ADIKTIF	1	1	1 DEPUTI I BIDANG PENGAWASAN OBAT NARKOTIKA PSIKOTROPIKA PREKURSOR DAN ZAT ADIKTIF(1)	0	0	0	0	0	99.98	98.2	100	81.21	94.3	0	0	-9,31E+03	-8,44E+02	1,06E+04
DEPUTI II BIDANG PENGAWASAN OBAT TRADISIONAI SUPLEMEN KESEHATAN DAN KOSMETIK	1	1	1 DEPUTI II BIDANG PENGAWASAN OBAT TRADISIONAI SUPLEMEN KESEHATAN DAN KOSMETIK(1)	0	0	0	0	0	99.98	93.66	100	85.23	94.62	0	-9,64E+03	-9,73E+02	0	1,06E+04
DEPUTI III BIDANG PENGAWASAN PANGAN OLAHAN	1	1	1 DEPUTI III BIDANG PENGAWASAN PANGAN OLAHAN(1)	0	0	0	0	0	99.99	99.81	100	72.93	92.22	0	0	-8,01E+03	-2,72E+03	1,08E+04
PUSAT PENGEMBANGAN PENGUJIAN OBAT DAN MAKANAN NASIONAL	0.999949	54	DEPUTI III BIDANG PENGAWASAN PANGAN OLAHAN(0.271126)															
DEPUTI IV BIDANG PENINDAKAN	1	1	1 DEPUTI IV BIDANG PENINDAKAN(1)	0	0	0	0	0	99.99	83.19	100	57.58	84.81	-6,31E+02	-1,13E+03	0	0	1,18E+04
PUSAT ANALISIS KEBIJAKAN OBAT DAN MAKANAN	1	1	1 PUSAT ANALISIS KEBIJAKAN OBAT DAN MAKANAN(1)	0	0	0	0	0	99.08	98.57	100	52.4	86.04	-5,21E+03	-2,22E+02	0	-5,06E+03	1,16E+03
PUSAT DATA DAN INFORMASI OBAT DAN MAKANAN	1	1	1 PUSAT DATA DAN INFORMASI OBAT DAN MAKANAN(1)	0	0	0	0	0	99.98	99.55	100	62.91	89.31	0	-1,99E+03	-6,00E+03	-3,20E+03	1,12E+04
BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI SERANG	0.999973	45	BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN BANJARMASIN(0.313767)															
PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN	0.999977	42	DEPUTI I BIDANG PENGAWASAN OBAT NARKOTIKA PSIKOTROPIKA PREKURSOR DAN ZAT ADIKTIF(0.140457)															
BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI BATAM	1	1	1 BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI BATAM(1)	0	0	0	0	0	99.82	99.95	100	52.32	86.34	-9,58E+02	-2,11E+03	-5,20E+03	-3,32E+03	1,16E+04
LOKA POM DI KOTA SURAKARTA	1	1	1 LOKA POM DI KOTA SURAKARTA(1)	0	0	0	0	0	99.88	93.67	100	54.16	85.73	-1,03E+03	-2,12E+03	-5,18E+03	-3,34E+03	1,17E+04

DMU	Score	Rank	Benchmark (lambda)	Slack Movement (Penyerapan)	Slack Movement (Konsistensi)	Slack Movement (CRO)	Slack Movement (NE)	Slack Movement (Kinerja)	Projection (Penyerapan)	Projection (Konsistensi)	Projection (CRO)	Projection (NE)	Projection (Kinerja)	Dual Price (Penyerapan)	Dual Price (Konsistensi)	Dual Price (CRO)	Dual Price (NE)	Dual Price (Kinerja)
LOKA POM DI KOTA TASIKMALAYA	0.999924	69	BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN BANJARMASIN(0.018106)															
LOKA POM DI KABUPATEN KEDIRI	1	1	LOKA POM DI KABUPATEN KEDIRI(1)	0	0	0	0	0	99.58	94.51	100	51.7	85.15	-1,13E+03	-2,14E+02	-5,11E+03	-3,36E+03	1,17E+04
BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI PANGKAL PINANG	0.999903	81	DEPUTI IV BIDANG PENINDAKAN(0.053019)															
LOKA POM DI KABUPATEN JEMBER	0.99997	46	BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN BENGKULU(0.05158)															
LOKA POM DI KABUPATEN BANYUMAS	0.999923	70	BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN PALU(0.377626)															
LOKA POM DI KOTA PALOPO	0.999912	77	DEPUTI I BIDANG PENGAWASAN OBAT NARKOTIKA PSIKOTROPIKA PREKURSOR DAN ZAT ADIKTIF(0.094057)															
LOKA POM DI KABUPATEN BOGOR	0.999937	61	BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN BANJARMASIN(0.055446)															
LOKA POM DI KABUPATEN TANGERANG	1	1	LOKA POM DI KABUPATEN TANGERANG(1)	0	0	0	0	0	99.65	99.96	100	53.98	86.8	-1,09E+03	-1,91E+03	-5,23E+02	-3,29E+03	1,15E+04
BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI TARAKAN	1	1	BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI TARAKAN(1)	0	0	0	0	0	99.83	98.91	100	50.73	85.69	0	0	0	-1,97E+03	1,17E+04
LOKA POM DI KOTA DUMAI	1	1	LOKA POM DI KOTA DUMAI(1)	0	0	0	0	0	99.98	98.78	100	51.8	85.99	0	-2,11E+03	-6,19E+03	-3,33E+03	1,16E+04
LOKA POM DI KOTA BAUBAU	0.999931	65	DEPUTI I BIDANG PENGAWASAN OBAT NARKOTIKA PSIKOTROPIKA PREKURSOR DAN ZAT ADIKTIF(0.031754)															
LOKA POM DI KOTA LUBUKLINGGAU	0.999984	37	BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN BANJARMASIN(0.444031)															
LOKA POM DI KABUPATEN MIMIKA	0.99993	66	BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN BANJARMASIN(0.39026)															
LOKA POM DI KABUPATEN ENDE	1	1	LOKA POM DI KABUPATEN ENDE(1)	0	0	0	0	0	99.83	94.23	100	51.48	85.06	0	-3,63E+03	0	-1,28E+04	1,18E+04
LOKA POM DI KABUPATEN KEPULAUAN TANIMBAR	0.999979	39	BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN BANJARMASIN(0.101922)															
BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI GORONTALO	0.99994	58	BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN SOFIFI(0.290671)															
BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI MANOKWARI	0.999947	55	BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN BANJARMASIN(0.005638)															
Loka POM di Kabupaten Pulau Morotai	1	1	Loka POM di Kabupaten Pulau Morotai(1)	0	0	0	0	0	99.61	99.97	100	51.17	85.99	-7,09E+03	0	0	-5,75E+03	1,16E+04
Loka POM di Aceh Tengah	1	1	Loka POM di Aceh Tengah(1)	0	0	0	0	0	99.15	91.14	100	53.67	85.05	-4,94E+03	-3,02E+02	0	-4,36E+02	1,18E+04
Loka POM di Kota Tanjungbalai	0.999917	72	BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN BANJARMASIN(0.724331)															
Loka POM di Kota Payakumbuh	1	1	Loka POM di Kota Payakumbuh(1)	0	0	0	0	0	99.74	97.69	100	52.94	86.1	-1,13E+03	-2,12E+03	-5,04E+03	-3,32E+03	1,16E+03
Loka POM di Kota Sungai Penuh	0.999939	59	BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN BANJARMASIN(0.341787)															
Loka POM di Kabupaten Tulangbawang	1	1	Loka POM di Kabupaten Tulangbawang(1)	0	0	0	0	0	99.38	97.81	100	51.94	85.8	-1,16E+03	-2,12E+03	-5,04E+03	-3,34E+03	1,17E+04

DMU	Score	Rank	Benchmark (lambda)	Slack Movement (Penyerapan)	Slack Movement (Konsistensi)	Slack Movement (CRO)	Slack Movement (NE)	Slack Movement (Kinerja)	Projection (Penyerapan)	Projection (Konsistensi)	Projection (CRO)	Projection (NE)	Projection (Kinerja)	Dual Price (Penyerapan)	Dual Price (Konsistensi)	Dual Price (CRO)	Dual Price (NE)	Dual Price (Kinerja)
Loka POM di Kabupaten Sanggau	1	1	Loka POM di Kabupaten Sanggau(1)	0	0	0	0	0	99.25	99.84	100	51.98	86.16	-5,30E+03	-2,08E+02	0	-5,12E+03	1,16E+04
Loka POM di Kabupaten Kotawaringin Barat	1	1	Loka POM di Kabupaten Kotawaringin Barat(1)	0	0	0	0	0	99.99	99.88	100	52.89	86.5	0	-2,08E+03	-6,17E+03	-3,31E+03	1,16E+04
Loka POM di Kabupaten Hulu Sungai Utara	0.999965	48	DEPUTI I BIDANG PENGAWASAN OBAT NARKOTIKA PSIKOTROPIKA PREKURSOR DAN ZAT ADIKTIF(0.13523)															
Loka POM di Kota Balikpapan	1	1	Loka POM di Kota Balikpapan(1)	0	0	0	0	0	99.69	99.37	100	51.4	85.96	-1,12E+03	-2,12E+03	-5,07E+03	-3,33E+03	1,16E+04
Loka POM di Kabupaten Kepulauan Sangihe	1	1	Loka POM di Kabupaten Kepulauan Sangihe(1)	0	0	0	0	0	99.62	99.89	100	52.42	86.34	-1,13E+03	-2,11E+03	-5,04E+03	-3,31E+03	1,16E+04
Loka POM di Kabupaten Banggai	0.999953	53	BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN BANJARMASIN(0.32821)															
Loka POM di Kabupaten Buleleng	0.999936	62	BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN BANJARMASIN(0.230355)															
Loka POM di Kabupaten Bima	1	1	Loka POM di Kabupaten Bima(1)	0	0	0	0	0	95.58	93.57	100	65.11	88.42	-4,72E+03	-4,12E+03	0	-2,51E+03	1,13E+04
Loka POM di Kabupaten Merauke	1	1	Loka POM di Kabupaten Merauke(1)	0	0	0	0	0	97.36	99.7	99.49	55.77	86.82	-9,87E+02	-1,15E+03	-6,08E+03	-3,29E+03	1,15E+04
Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong	0.999911	78	BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN BANJARMASIN(0.746473)															
Loka POM di Kota Tanjungpinang	0.999975	43	BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN BANJARMASIN(0.795607)															
Loka POM di Kabupaten Belitung	0.999943	56	BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI BATAM(0.079688)															
Loka POM di Kabupaten Sorong	1	1	Loka POM di Kabupaten Sorong(1)	0	0	0	0	0	99.82	98.26	100	50.99	85.65	-8,80E+02	-2,12E+03	-5,32E+03	-3,37E+03	1,17E+04
Loka POM di Aceh Selatan	0.99998	38	BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN BANJARMASIN(0.153108)															
Loka POM di Kabupaten Toba Samosir	1	1	Loka POM di Kabupaten Toba Samosir(1)	0	0	0	0	0	96.96	99.54	100	57.31	87.41	-7,71E+03	0	0	-4,40E+03	1,14E+04
Loka POM di Kabupaten Dharmasraya	0.999988	36	BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN BANJARMASIN(0.41002)															
LOKA POM DI KABUPATEN INDRAGIRI HULU	0.999914	76	BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN BANJARMASIN(0.247485)															
Loka POM di Kabupaten Tanah Bumbu	0.999994	35	BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN BANJARMASIN(0.025567)															
Loka POM di Kabupaten Manggarai Barat	1	1	Loka POM di Kabupaten Manggarai Barat(1)	0	0	0	0	0	94.92	98.18	100	66.73	89.66	-7,52E+03	0	0	-4,29E+03	1,12E+04

DMU	Score	Rank	Benchmark (lambda)	Slack Movement (anggaran)	Slack Movement (stakeholder)	Slack Movement (internal)	Slack Movement (lg)	Projection (anggaran)	Projection (stakeholder)	Projection (internal)	Projection (lg)	Dual Price (anggaran)	Dual Price (stakeholder)	Dual Price (internal)	Dual Price (lg)	RTS Offset
Loka POM di Kabupaten Dharmasraya	0.991232		19 Loka POM di Kabupaten Bima(0.144928)													
Loka POM di Kabupaten Kotawaringin Barat	0.963823		50 Direktorat Intelijen Obat dan Makanan(0.08654)													
Loka POM di Kabupaten Indragiri Hulu	0.996944		10 Direktorat Pengawasan Keamanan Mutu dan Ekspor Impor Obat Narkotika Psicotropika dan Zat Adiktif(0.71967)													
Loka POM di Kabupaten Sanggau	0.938934		83 Direktorat Pengawasan Keamanan Mutu dan Ekspor Impor Obat Narkotika Psicotropika dan Zat Adiktif(0.716068)													
Loka POM di Kota Balikpapan	0.912108		96 Direktorat Penyidikan Obat dan Makanan(0.883268)													
Loka POM di Kota Tanjung Pinang	0.974331		40 Direktorat Pengawasan Keamanan Mutu dan Ekspor Impor Obat Narkotika Psicotropika dan Zat Adiktif(0.455222)													
Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong	0.923911		94 DIREKTORAT PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PELAKU USAHA OBAT TRADISIONAL SUPLEMEN KESEHATAN DAN KOSMETIK(0.257252)													
Loka POM di Kota Sungai Penuh	0.991267		18 Direktorat Pengawasan Keamanan Mutu dan Ekspor Impor Obat Narkotika Psicotropika dan Zat Adiktif(0.615282)													
Loka POM di Kabupaten Manggarai Barat	0.847021		103 Direktorat Pengawasan Keamanan Mutu dan Ekspor Impor Obat Narkotika Psicotropika dan Zat Adiktif(0.249533)													
Loka POM di Kabupaten Sorong	0.946328		71 Direktorat Pengawasan Keamanan Mutu dan Ekspor Impor Obat Narkotika Psicotropika dan Zat Adiktif(0.943894)													
Loka POM di Kabupaten Banggai		1	1 Loka POM di Kabupaten Banggai(1)	0	0	0	0	97.42	113.21	113.21	87.78	0	6,01E+03	2.825,06	-	-1
Loka POM di Kabupaten Belitung	0.98913		22 ro sdm(0.593693)													
Loka POM di Kabupaten Pulau Morotai	0.959058		57 Direktorat Intelijen Obat dan Makanan(0.330167)													

POLITEKNIK
STIA LAN
JAKARTA

Lampiran III

INSTRUMEN PENELITIAN REDESAIN SISTEM PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN UNTUK PENGUATAN PENGANGGARAN BERBASIS KINERJA di BPOM

PANDUAN TELAHAH DOKUMEN

NO	NAMA DOKUMEN	HAL YANG DITELAHAH
1	Rencana Strategis BPOM Tahun 2020-2024	<ul style="list-style-type: none">• Sasaran Strategis• Sasaran Program• Output Program• Sasaran Kegiatan• Target Kinerja
2	Renja 2022	<ul style="list-style-type: none">• Sasaran Strategis• Sasaran Program• Output Program• Sasaran Kegiatan• KRO• RO• Target kinerja
3	RKA K/L 2022	<ul style="list-style-type: none">• Sasaran Program• Output Program• Sasaran Kegiatan• KRO• RO• Target kinerja• Detil komponen dan anggaran
4	LAKIP 2022	<ul style="list-style-type: none">• Sasaran Strategis• Sasaran Program• Output Program• Sasaran Kegiatan• Capaian Kinerja

PEDOMAN WAWANCARA

A. Tujuan

1. Untuk memperoleh data dan informasi penerapan Redesain Sistem Perencanaan dan Penganggaran (RSPP) dalam rangka untuk memperkuat Penganggaran Berbasis Kinerja di BPOM
2. Untuk memperoleh data dan informasi dalam menyusun rekomendasi kebijakan dalam rangka optimalisasi implementasi penganggaran berbasis kinerja di BPOM.

B. Pertanyaan Penelitian

Aspek	Informan	Pertanyaan
Redesain Sistem Perencanaan dan Penganggaran	Informan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8	<ol style="list-style-type: none">1. Bagaimana proses perumusan nomenklatur program, Kegiatan, Output dan Outcome dalam penerapan RSPP di Badan POM?2. Bagaimana proses sinkronisasi penyusunan RENJA dan RKAKL dalam perencanaan dan penganggaran tahunan.3. Bagaimana konsistensi dokumen perencanaan, penganggaran sampai evaluasi pada saat tahun pelaksanaan kegiatan.
Indikator Kinerja	Informan 1, 2, 4, 6, 7, 8	<ol style="list-style-type: none">1. Bagaimana proses perumusan informasi kinerja dalam penyusunan renstra dan Renja?2. Bagaimana penerapan <i>logic model</i> dalam penyusunan informasi kinerja sesuai RSPP di BPOM?
Standar Biaya	Informan 3, 4, 5	<ol style="list-style-type: none">1. Bagaimana implementasi standar biaya dalam konsep value for money di BPOM ?2. Bagaimana menentukan skala prioritas pada saat menyusun anggaran belanja?3. Dalam pelaksanaan anggaran fokusnya apakah efisiensi belanja atau penyerapan anggaran secara optimal?
Penganggaran Berbasis Kinerja	Informan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8	<ol style="list-style-type: none">1. Bagaimana implementasi penganggaran berbasis kinerja yang terdiri dari tiga pilar yaitu indikator kinerja, standar biaya dan evaluasi kinerja di BPOM?2. Bagaimana penerapan konsep <i>money follow program</i> di BPOM?3. Sejauh mana optimalisasi Biro Perencanaan dan keuangan BPOM dalam menilai usulan Anggaran dan Kegiatan dari Satker?4. Sejauh mana penyusunan dokumen RKA-K/L telah mengacu pada sasaran dan target Kinerja pada dokumen RKP, Renstra maupun Renja K/L, dan evaluasi Kinerja?5. Bagaimana Kendala ataupun kekurangan dalam pelaksanaan PBK di BPOM?
Evaluasi kinerja	Informan 9,10,11,12,13	<ol style="list-style-type: none">1. Kriteria Kepemimpinan

Aspek	Informan	Pertanyaan
dengan menggunakan model EFQM		<ol style="list-style-type: none"> a. Bagaimana pimpinan mengembangkan dan mensosialisasikan visi, misi organisasi? b. Bagaimana pimpinan terlibat langsung memastikan dalam sistem perencanaan dan penganggaran? c. Bagaimana interaksi pimpinan dengan stakeholder dalam upaya pencapaian target kinerja? d. Bagaimana pimpinan menciptakan budaya kerja yang unggul kepada seluruh pegawai dalam rangka pencapaian kinerja? e. Bagaimana langkah pimpinan dalam mengidentifikasi dan mengantisipasi perubahan serta berhasil menghadapi perubahan tersebut? <ol style="list-style-type: none"> 2. Kriteria Kebijakan dan Strategi <ol style="list-style-type: none"> a. Sejauh mana kebijakan dan strategi yang dibuat berdasarkan kebutuhan saat ini dan masa yang akan datang, dan apakah dibuat sesuai harapan stakeholder? b. Sejauh mana kebijakan dan strategi dibentuk berdasarkan informasi dari pengukuran kinerja, apakah dari hasil surey, proses pembelajaran dan faktor eksternal? c. Sejauh mana kebijakan dan strategi dikembangkan, dikaji dan diperbaharui? d. Bagaimana kebijakan dan strategi dikomunikasikan dan dijabarkan dalam suatu kerangka kerja dari prosedur-prosedur kunci? 3. Kriteria Sumber daya Manusia <ol style="list-style-type: none"> a. Bagaimana perencanaan, pengelolaan dan pengembangan SDM dalam mencapai Kinerja Organisasi b. Sejauh mana pengetahuan dan kompetensi SDM dikembangkan dan ditingkatkan? c. Sejauh mana seluruh SDM terlibat aktif dalam pencapaian kinerja? d. Bagaimana bentuk komunikasi antara pegawai dan pimpinan dalam pencapaian kinerja? e. Sejauh mana SDM mendapatkan reward dan punishment dalam pencapaian kinerja? 4. Kriteria manajemen Sumber Daya dan Kemitraan <ol style="list-style-type: none"> a. Bagaimana pengelolaan kemitraan dengan pihak eksternal dalam pencapaian kinerja? b. Bagaimana pengelolaan keuangan dalam pencapaian kinerja? c. Bagaimana pengelolaan sarana dan prasarana dalam mencapai kinerja? d. Bagaimana pengelolaan teknologi dalam pencapaian kinerja? e. Bagaimana pengelolaan informasi dan ilmu pengetahuan dalam pencapaian kinerja?

Aspek	Informan	Pertanyaan
		<ol style="list-style-type: none"> 5. Kriteria proses <ol style="list-style-type: none"> a. Sejauh mana proses pencapaian kinerja telah dilakukan secara sistematis dan dikelola? b. Sejauh mana proses pencapaian kinerja telah menggunakan inovasi untuk memenuhi kebutuhan pelanggan dan stakeholder? c. Bagaimana produk dan pelayanan dirancang dan dikembangkan yang berdasarkan kebutuhan dan harapan pelanggan? d. Sejauh mana produk dan pelayanan diselesaikan sampai selesai dan diserahkan kepada pelanggan? e. Bagaimana mengelola hubungan dengan pelanggan? 6. Kriteria Kepuasan Pelanggan <ol style="list-style-type: none"> a. Sejauh mana pengukuran persepsi pelanggan terhadap pelayanan yang diberikan? b. Bagaimana indikator kinerja kepuasan pelanggan? 7. Kriteria kepuasan pegawai <ol style="list-style-type: none"> a. Bagaimana pengukuran persepsi pegawai terhadap pelayanan yang diberikan? b. Bagaimana indikator kepuasan pegawai? 8. Kriteria Hasil Sosial Masyarakat <ol style="list-style-type: none"> a. Bagaimana pengukuran persepsi masyarakat terhadap satker? b. Bagaimana indikator kepuasan masyarakat? 9. Kriteria Hasil Kinerja <ol style="list-style-type: none"> a. Bagaimana hasil kinerja terutama outcome satker? b. Sejauh mana pengukuran indikator kinerja diterapkan pada satker Bapak/Ibu?

LAMPIRAN IV TRANSKIP WAWANCARA

Transkrip Wawancara Narasumber 1 Redesain Sistem Perencanaan dan Penganggaran Untuk Penguatan Penganggaran Berbasis Kinerja di BPOM

Nama : Ali Muharam, SIP, MSE, MA (AM)
Jabatan : Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan
Hari, tanggal : Rabu, 27 September 2023
Lokasi : Ruang Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan BPOM

A. Pertanyaan aspek Redesain Sistem Perencanaan dan Penganggaran

1. Bagaimana proses perumusan nomenklatur program, Kegiatan, Output dan Outcome dalam penerapan RSPP di Badan POM?

Jadi kalau dulu itu satu eselon satu itu ada satu program dan level kegiatan untuk eselon 2. Jadi kalau misalnya ada 6 eselon satu kedeputian ada 6 program, kegiatannya macam macam ya. Kalau misalnya ada 5 program ada 5 kegiatan. Nah kalau sekarang kan dengan era RSPP ini paradigmanya diubah ya jadi 1 program itu bukan satu eselon satu, tapi satu program itu bisa dilakukan oleh atau meliputi berbagai macam eselon satu, tapi dia harus menuju kepada pencapaian target ataupun kinerja organisasi. Dalam hal ini Badan POM kalau saya lihat sendiri sudah melakukan penerapan RSPP ini, malah mungkin ya sudah dilakukan sebelum Kementerian Keuangan dan Bappenas menyusun atau menerapkan RSPP sendiri ya. (AM 1) maksudnya Redesign Sistem Perencanaan Penganggaran nah jadi kalau di kita kan di Badan POM ini. Sekarang udah contohnya kita punya 4 eselon satu ya 4 kedeputian tapi programnya kan secara keseluruhan hanya 2. Pertama program pengawasan obat dan makanan yang kedua adalah program Dukman (dukungan manajemen). Jadi kalau kita bicara lingkup Badan POM sebetulnya. Sebelum Kementerian Keuangan dan Bappenas dengan desain

yang menerapkan SOP, kita sudah menerapkan satu program teknis ya. Kemudian ada lagi program sifatnya dukungan manajemen. **Jadi kalau menurut kami. Apa namanya Jadi dengan adanya RSPP yang bikin kita enggak kaget lagi ya (AM-2).** karena memang desain kita dari awal kita punya 6 eselon satu yang satu kan Dukman ya, segmen yang satu pengawasan tapi 4 itu kita enggak punya 4 program. Hanya 2 program pengawasan obat dan makanan yang satu lagi program beban gitu. Jadi sekali lagi. Sudah terserap cerminkan yg RSRP ini kalau di Badan POM melalui tadi program yang hanya terdiri dari 2. Nah dengan demikian. Untuk perumusan nomenklatur program kegiatan output output sebetulnya harusnya kita lebih mudah ya dengan lebih fokus lah dengan 2 program ini dijabarkan ke katakanlah 4 ke deputian teknis kemudian nanti di jabarkan lagi di masing masing eselon 2 pada ke deputian.

B. Pertanyaan Aspek Indikator Kinerja

1. Bagaimana penerapan *logic model* dalam penyusunan informasi kinerja sesuai RSPP di BPOM?

Penyusunan informasi kinerja di BPOM menggunakan Balance Score Card (AM-3). Meskipun kita apa namanya menggunakan pendekatan BSC itu, tetapi pada dasarnya. Apa namanya, tidak perlu dipertentangkan ya karena BSC itu kan perspektif. Perspektif ya kalau di swasta ada 4 perspektif, kalau kita hanya 3 kan learning and growth. stakeholder perspektif sama internal proses. **Nah kalau logic model ini sebetulnya, kita ingin melihat hubungan antara mulai dari input proses output outcome impact dari suatu program ataupun kegiatan (AM-4).** Katakanlah program kegiatan itu kita grouping. Ke dalam 3 perspektif itu. Jadi misalnya. Kegiatan program terkait dengan apa, pengawasan obat atau pangan olahan itu kan sebenarnya kita melihat dari sisi stakeholder ya, tetapi dalam menyusun Program tersebut. Program pengawasan obat dan makanan atau spesifiknya pengawasan pangan olahan katakan pengelolaan kita tetap menerapkan logic model. **Jadi misalnya. Apa sih**

yang akan kita lakukan, itu kan diawali dari masalah ya. Oke, kita tahu identifikasi masalahnya apa misalnya banyaknya pangan yang dlam rumah tangga yang tidak memenuhi syarat, misalnya itu kan masalah. Nah kemudian kita mulai dari proses logic model (AM-6). Input inputnya apa, misalnya (1) penyuluhan keamanan pangan, (2) regulasi ada segala macam, (3) dana, kemudian input dan proses. Prosesnya apa dalam bentuk kegiatan dan proses dalam bentuk pembinaan pelaku usaha rumah tangga. Kemudian dari sisi konsumen penyuluhan kepada konsumen yang mengkonsumsi pangan rumah tangga supaya lebih teliti untuk meneliti apa kek nya. Nah kemudian dari sisi itu kan proses outputnya apa yang diharapkan, misalnya menurunnya, atau meningkatnya industri rumah tangga yang sesuai dengan standar cara produksi pangan yang baik, pengolahan yang baik. Kemudian input process. Itu output outcome nya apa? Misalnya masyarakat mendapatkan asupan pangan aman. Nah dampaknya tapi apa outcome nya, apa impact nya berarti dari sisi kesehatan, kemudian dari kedua ekonomi dilihat dari pangan rumah tangga atau industri pangan rumah tangga yang diolah itu akan meningkat volumenya penjualannya, sehingga secara ekonomi membawa manfaat bagi para pelaku usaha kecil. Nah itu kan informasi kinerja yang menggunakan logic model. Nah, tetapi kita kalau kita grouping tadi itu masuk ke dalam perspektif stakeholder gitu.

2. Bagaimana penyusunan informasi kinerja ke depannya di BPOM?

Mungkin kedepannya juga selalu ya perbaiki itu ke depan itu menurut saya harus lebih tajam jadi semua program kegiatan itu. Sebelum diusulkan pendanaannya program itu akan diterapkan dibuatlah analisis singkat menggunakan logic model (AM-5), apakah benar misalnya secara data itu karena ini kan program kegiatan itu dibuat atau disusun untuk memecahkan suatu masalah. Kita membuat program itu karena ada masalah. Kalau ada masalah kita enggak usah ngapain juga baik baik saja kan. Nah untuk penerapan itu. Kita harus analisis tadi cost ya apa namanya akar permasalahannya itu mana. Jangan sampai kita salah mendiagnosis.

Buat program kegiatan tapi tanpa login model sehingga apa namanya program dan kegiatan yang dilaksanakan itu tidak tepat sasaran. Karena kita enggak tahu misalnya yang harusnya dibina itu. UMKM nya tetapi kita fokusnya ke masyarakatnya sebagai konsumen gitu. Jadi itu penting logic model agar informasi kinerja juga terekam ya, jadi misalnya apa namanya ada smart spesifik, sehingga program kegiatan tersebut saat dilaksanakan jelas oh ini program punya siapa. Meskipun memang ada unit kerja lain untuk deputi lain yang ini ya bersinggungan bersama, tetapi siapa sebenarnya pengampu utamanya? Kemudian penilaian gimana untuk menilai atau menilai ya menilai kinerja itu bahwa program ini berhasil? Apakah persentase atau indeks, jadi ada ukuran ukuran untuk memastikan bahwa program kegiatan diusulkan itu, kita sudah tahu tools yang dipakai untuk mengukurnya. Dan ke depannya mungkin nanti memang dalam pengusulan anggaran atau kegiatan sebaiknya dalam melakukan review mungkin di rencana untuk memerlukan sebuah matrik keterkaitan antara input proses sampai outcome yang akan dicapai. Sampai informasi ini menunjang pencapaian organisasi yang mana. sehingga yang mana itu harus bisa dilacak dari bawah ke atas bisa dibaca dari atas ke bawah, sehingga bisa diturunkan/cascading. Jadi orang bolak balik bacanya dari bawah ke atas bisa.

C. Pertanyaan Penganggaran Berbasis Kinerja

1. Bagaimana implementasi penganggaran berbasis kinerja yang terdiri dari tiga pilar yaitu indikator kinerja, standar biaya dan evaluasi kinerja di BPOM?

Kalau menurut saya penganggaran berbasis kinerja ini Budgeting system. Pertama penganggaran kinerja ini kita harus bisa mengalokasikan anggaran namun juga dari alokasi anggaran itu kita bisa tahu indikator kinerja mana yang dituju yang dicapai atau yang ingin dicapai. Pada saat kita menyusun perencanaan penganggaran kita harus tahu bahwa indikator kegiatan ini yang dianggarkan. Sekian rupiah miliar atau ratus juta ini akan

mencapai kinerja indikator kinerja yang mana? Atau seperti apa indikator kerjanya? Sehingga apa namanya kita jelas anggaran ini. Katakan misalnya Rp1000 ini dapat menurun prevalensi apa stunting ataupun dapat meningkatkan kesadaran masyarakat sekian orang gitu jadi itu indikator kinerja. Kemudian kita ukur lagi indeksnya seperti apa, kesadaran yang dimaksud itu seperti apa. Implementasi penganggaran berbasis kinerja yang kedua adalah. Pada saat kita mengukur kinerja kita harus melihat selain direktorat pengampu kinerja ini di pengaruhi oleh direktorat mana lagi atau kegiatan apalagi yang bukan di direktorat dia misalnya. Contohnya upaya kesadaran masyarakat ya mungkin kesadaran masyarakat itu bisa dilakukan melalui KIE. Tapi juga bisa dilakukan oleh direktorat lain Regulasi misalnya, regulasi di bidang obat, dengan pengaruh kita terhadap produsen obat gitu. Jadi kita harus mengidentifikasi kegiatan kita ini sumbangannya dari mana saja. Tidak hanya dari direktorat terkait ya, tetapi juga ada share dari direktorat lain yang terkait dengan kegiatan tersebut. Nah, kalau berbasis anggaran kinerja, kita ini tahu ya sudah sampai ke sana, apa belum? Kita harus melihat sasaran target yang kita capai tadi lah katakan awareness produsen ya terhadap cara produksi obat yang baik nah berarti kan ada katakan tadi sedikitnya 2 direktorat yang satu misalnya kayaknya yang satu regulasinya nah. Kita juga melihat dari kedua ini berapa anggaran di masing masing. Jadi dengan demikian, Misalnya totalnya meskipun dibagi bagi ada direktorat ini direktur ini. Nah baru kita bisa mengukur apa namanya. Indikatornya seperti apa kan beda beda indikator ini. Kemudian kita bisa efisiensi dari uang tersebut misal dengan 7 miliar ini ternyata meningkatkan kesadaran produsen sekian persen tapi memang, kita harus bisa mengurai ya apa namanya menjabarkan rinci kegiatan ini ternyata penurunan peningkatan kesadaran sekian persen ini bukan hanya karena pengaruh kita. Ada pengaruh yang lebih penting lagi tentang mereka. Ternyata masyarakat produsen lebih takut kepada aturan karena aturan ini ada sanksi hukum. Misalnya sebenarnya ini hanya sebagai. Apa ya kesadaran aja mereka. Nah itu si maksudnya harus sampai ke sana ya kita

memang apa namanya menentukan ini karena. Nanti itu ada implikasi ke standar biaya juga. Jangan sampai kita misalnya membuat kegiatan ya kegiatannya peningkatan kesadaran apa produsennya terhadap produksi obat misalnya, tapi standar biayanya beda- beda. Kalau saya gini, kalau kita terpaku dengan satu kegiatan, satu target ini hanya bisa dicapai melalui satu kegiatan saja tentu itu tidak efektif. Penganggaran berbasis kinerja itu sebetulnya idealnya harus sampai ke sana karena kita nanti juga dari aspek evaluasinya. Kan kan kita nanti melihat misalnya. Itu kegiatan ya satu program, satu kegiatan di keroyokan oleh 4 kegiatan 4 aktivitas lah oleh unit regulasi, unit surveillence melalui sampling segala rupa, nanti kan kita akan mengevaluasi dari 4 atau dari 3 ini mana sih sebenarnya efektif untuk mencapai target indikator tersebut.

2. Bagaimana penerapan konsep *money follow program* di BPOM?

Money Follow program itu artinya kalau dulu itu function ya sebenarnya. Nah kalau mau follow function itu kan semua unit kerja dikasih duit nih, misalnya kedeputian 1, 2, dan 3 kita sama lah sama kasih duit dibagi. Dengan money follow program kita bisa melihat dari satu kebutuhan yang disebutkan itu mana yang betul-betul programnya itu terkait langsung dengan tujuan pencapaian. Apa namanya prioritas Badan POM nah jadi bisa jadi alokasi anggarannya enggak sama enggak dibagi rata. Ada satu deputi yang lebih tinggi karena ternyata kegiatannya secara umum menunjang langsung pencapaian organisasi. Ada juga mungkin deputi berikutnya yang tidak terlalu tinggi gitu karena dari 5 kegiatan hanya 3 yang terkait langsung dengan kebijakan organisasi duanya lebih ke arah kegiatan rutin. Jadi dengan program itu kita melihat bukan melihat fungsi ya, tapi melihat program program yang diusulkan oleh masing-masing unit kerja atau satker ataupun direktorat yang terkait dengan tujuan atau pencapaian sasaran organisasi terjadi seperti itu karena kalau enggak gitu kan nanti direktorat yang tidak tidak banyak terkait langsung ya dengan tujuan privasi akan mendapatkan alokasi yang sama besar gitu. Nah pasti mereka

belanjanya apa pasti belanja rutin dan sisanya lebih banyak ke perjalanan apalagi rapat rapat honorarium gitu kan narasumber. Padahal organisasi punya tujuan yang lebih besar daripada itu gitu. Jadi itu apa ya? Konsep money follow program di Badan POM saya lihat sudah diterapkan dalam distribusi alokasi anggaran itu. Di Badan POM sudah fokus ya. kita melihat misalnya direktorat di deputi itu 1 2, 3, 4 itu. Alokasinya memang disesuaikan dengan program program masing masing ke deputian yang secara langsung menunjang atau berkontribusi terhadap pencapaian tujuan Badan POM secara umum secara keseluruhan. Kegiatan mana sih yang akan berdampak.

3. Sejauh mana optimalisasi Biro Perencanaan dan keuangan BPOM dalam menilai usulan Anggaran dan Kegiatan dari Satker?

Sebagai Biro Perencanaan kita harus punya mapping untuk suatu kegiatan itu. Misalnya kegiatan peningkatan kesadaran produsen obat tadi. Ternyata tidak hanya satu kegiatan enggak jumlahnya katakan 5 miliar tetapi juga ditunjang oleh penegakan aturan regulasi terkait cara produksi obat yang baik dengan anggaran 2 miliar. Jadi ini kegiatan ini ternyata setelah disaat ya dari direktorat ABC segala macam. Ini 7 miliar kegiatannya. Berdasarkan hasil analisis dan evaluasi yang mana yang kira-kira yang berdampak signifikan itu akan lebih difokuskan penganggarnya.

4. Bagaimana peningkatan kualitas penyusunan Renstra, Renja dan RKA-KL serta penyempurnaan penerapan penganggaran berbasis kinerja di BPOM.

Kalau menurut saya sih ini ya peningkatan kualitas Renstra Renja itu ini harus jelas dari atas maupun ke bawahnya ya cantolan ke atasnya maupun ke bawahnya. Jadi jangan sampai hilang. Kalau sampai hilang berarti kan nanti pasti bolong loh satu tahun bolong kan targetnya tidak tercapai. Nah. Kalau sudah ada Renja artinya harus diposkan untuk pendanaannya Kalau nambah kegiatan pada tahunan enggak apa-apa tapi kalau berkurang dari renstra itu jangan karena kalau berkurang. Selain itu yang harus dilihat ke atas, dimulai dengan melihat Renstra apa sudah inline dengan RPJMN/RPJP. Nah kalau cantolannya sudah nyambung semua ke bawahnya

renstra ini akan dibagi habis coba ke dalam beberapa deputi. Nah berarti kan kita punya 6 ya eselon satu dibagi. Kemudian dibagi lagi ke dalam masing masing eselon satu direktorat lah katakan eselon 2. Kemudian. Di 2 kan nanti dibagi lagi ya kan dalam apa kalau sekarang namanya eselon 3 ketua tim atau ketua pokja apa ya sampai dibagi habis. Namun demikian, pada saat renstra itu kita menyusun 5 tahun, tetapi di dalamnya ada breakdown tahunannya kan misalnya. Target 5 tahun. Karena akumulatif satunya desa misalnya seperti desa pangan aman 500 setahunnya 100 tercermin di dalam renja, jadi renja itu kan tahunan ya renja itu nah itu harus line dengan apa yang ditulis atau ditargetkan di dalam Renstra. Breakdownnya ke dalam renja itu harus jelasnya tadi kayak desa itu 100. Nah dari 100 kita punya perhitungan unit cost 100 itu 100 desa. Satu desa itu berapa duit untuk program desa pangan aman misalnya? Berarti kan katakan 1.000/100 unit costnya.

POLITEKNIK
STIA LAN
JAKARTA

Transkrip Wawancara Narasumber 2
Redesain Sistem Perencanaan dan Penganggaran Untuk Penguatan Penganggaran
Berbasis Kinerja di BPOM

Nama : Dr. Sandra Barinda, S.Si, Apt, M.Si (SB)
Jabatan : Fungsional Perencana Madya Biro Perencanaan dan Keuangan
Hari, tanggal : Rabu, 27 September 2023
Lokasi : Biro Perencanaan dan Keuangan BPOM

A. Pertanyaan aspek Redesain Sistem Perencanaan dan Penganggaran

1. Bagaimana proses perumusan nomenklatur program, Kegiatan, Output dan Outcome dalam penerapan RSPP di Badan POM?

Rumusan nomenklatur program kegiatan sebenarnya kan banyak regulasi dan pedoman nya. Dalam penyusunan program kegiatan output dan tentunya pertama dimulai dari penyusunan rencana strategis. Kalau bahkan lihat mundur lagi tentu dari RPJMN. Setiap 5 tahun kita akan menyusun RPJMN nasional, kemudian yang diacu di turunkan menjadi restra dari Kementerian lembaga, dalam penyusunan renstra ini tentunya kita melihat yang pertama, misalnya dari indikator yang ditagging untuk prioritas nasional dalam RPJMN. Lalu untuk terkait dengan program kegiatan output dan outcome mengacu kepada pedoman dari Bappenas. Saya mulai dari 5 tahun ambil dahulu ya. Badan POM itu mengacu pedoman penyusunan renstra dari Bappenas. Tata cara penyusunan renstra bagi Kementerian, kemudian itu yang menjadi acuan kita. Kemudian renstra itu pun ditelaah. Oleh Bappenas sebelum ditetapkan oleh pimpinan lembaga. Dalam renstra BPOM tersebut ada namanya Peta strategi. Peta strategi itu jadi dasar penyusunan manajemen kinerja di BPOM. Peta strategi mengaju tools dari balancescorecard ke kemudian menjadi peta strategi dan itu menjadi cikal bakal untuk penyusunan atau perumusan neomenkatur program kegiatan output. Dalam RSPP sebenarnya memang tidak hanya terkait dengan perencanaan tahunan ya, tapi dengan dimulai dengan perencanaan strategis

juga, seperti itu. Nah, nanti ketika di perencanaan strategis ini, ini kan renstra ini kan hanya bersifat indikatif ya, maksudnya selama 5 tahun, namun pemutahirannya berjalan di tahun ke tahunnya. Seperti sekarang kita sudah melakukan proses trilateral meeting di dalamnya ada program kegiatan output outcome target dan anggaran dari Kementerian lembaga (SB-1). Jadi ya Kalau saya lihat proses perumusan nomenklatur, program kegiatan output dan outcome itu tidak saja berimplikasi dalam penyusunan dokumen perencanaan penganggaran, tapi juga berimplikasi dalam penyusunan akuntabilitas kinerja melalui perjanjian kinerja. Ini prosesnya jadi pertama dari 5 tahunan, kemudian menjadi peta strategis, ada strategis dan seterusnya kemudian diturunkan lagi pemetaan lagi menjadi tahunan di mana program kegiatan output dan outcome misalnya program memiliki 2 program program dukungan manajemen dan juga program pengawasan obat dan makanan sebagai program teknis. Dan kegiatan-kegiatannya belum disesuaikan dengan pedoman dari RSPP Nah di mana waktu itu, Masih mengacu pada, apa ya unit eselon 2 nya gitu tapi ke depan mungkin ini harus disesuaikan dengan aktivitas nya (SB-2). Tapi untuk detailnya terkait dengan perumusan nomenklatur; jika ada hal hal yang mau ditanyakan lebih lanjut bisa berkoordinasi atau ditanyakan kepada mas ikhsan. Mbak Muznah. Karena saya lebih detail mereka yang lebih. Memegang. Kerjanya sehari hari, jadi mungkin bisa ditanyakan langsung mungkin.

2. Sejauh mana dokumen perencanaan, penganggaran sampai evaluasi memiliki konsistensi dan sinkronisasi yang tinggi?

Ini untuk kedepannya untuk perbaikannya. Nanti kami dalam rangka penyusunan renstra 2005 sampai 2029. Rencananya akan kami coba cari formulasi yang lebih tepat bersama mungkin dengan pakar. Bagaimana bisa win solution, maksudnya kita mendapatkan benefit atau manfaat yang lebih baik dengan menggunakan BSC. Karena kita juga harus merumuskan manajemen kinerja lebih tepat sasaran lebih tajam gitu,

sesuai dengan tugas pokok dan fungsi (SB-7). Agar semua supaya bisa dikaitkan nanti loh, jadi nanti rencananya akan berdiskusi lebih lanjut dengan pakar dan juga kita melakukan analisis SWOT yang lebih baik lagi karena dari analisa SWOT kemudian analyst cost kemudian untuk menjadi cikal bakal untuk peta strategi di Renstra berikutnya.

B. Pertanyaan Aspek Indikator Kinerja

1. Bagaimana proses perumusan informasi kinerja dalam penyusunan renstra dan Renja?

*Nah saya akan mundur kebelakang dulu ya mas dia terkait dengan peta strategis itu ada perspektif mengenai yang stakeholder. Internal proses dan learning and growth. Di situ ada sasaran strategisnya dan kemudian di diukur melalui indikator. Di BPOM ada untuk kekurangan dari permasalahan kekurangan ditemui dalam rumusan informasi kinerja. Kalau saya lihat agak sedikit kesulitan bagi BPOM terkait perencanaan kinerja yaitu karena BPOM menyusun peta strategis menyusun Renstra peta strategis dari Balance Scorecard. Di mana di situ ada perspektif stakeholder, internal proses dan learnig and growth, sedangkan umumnya dalam penyusunan restra itu menggunakan pendekatan logframe (SB-5). Tapi itu bisa di apa ya? Bisa dipetakan di jalan menang merahnya. Nah, namun ini tentunya kalau berdasarkan peta strategi karena dia ada suatu semacam rangkaian tahapan proses dari input, kemudian prosesnya kemudian. Perspektif stakeholder nya jadi emang berimplikasi dengan banyaknya indikator ya cukup banyak indikator yang diperoleh dari peta strategis itu karena ada yang ditetapkan internal proses. Ada yang bersifat outcome dari perspektif holder. Jadi itu yang agak sedikit menjadi permasalahan di bpom karena nanti ketika di. Misalnya kayak sasaran strategis ada 11. Ada 11 sasaran strategis sedangkan di program BPOM hanya ada 2. Dukungan manajemen dan juga pengawasan obat dan makanan. Nah ini tentunya sasaran strategis kan posisinya harusnya mungkin lebih tinggi. **Sasaran strategis yang terlalu banyak menimbulkan***

indikator sasaran kegiatan yang cukup banyak juga (SB-3). Hal ini disebabkan jadi ini harus bisa dipertahankan atau di benang merah. Yang jelas sehingga ini menjadi tantangan gitu ya.

2. Bagaimana penerapan *logic model* dalam penyusunan informasi kinerja sesuai RSPP di BPOM?

Terkait dengan tadi informasi kinerja itu ada kesulitannya terutama dari mensinkronkan antara BSC renstra dengan kebutuhan dari stakeholder dalam penyusunan RSPP (SB-4). Memang dia seperti itu dasarnya adalah memang bentuk kerangka logis bagaimana model dalam penyusunan informasi kinerja penyusunan informasi kinerja output itu harus mendukung informasi kinerja kegiatan, penyusunan informasi kinerja kegiatan itu harus mendukung capaian dalam mencapai informasi kinerja program dan program mendukung capaian sasaran strategis

C. Pertanyaan aspek Penganggaran Berbasis Kinerja

1. Sejauh mana optimalisasi Biro Perencanaan dan keuangan BPOM dalam menilai usulan Anggaran dan Kegiatan dari Satker?

*Nah terkait dengan penganggaran berbasis kinerja. Ya kalau menurut dengan penganggaran berbasis kinerja dengan standar biaya dan evaluasi kinerja. Kalau saya lihat sudah cukup baik ya di BPOM, karena memang kebetulan ya kalau kita kan biro perencanaan keuangan dalam menyusun itu benar-benar sesuai dengan kaidahnya seperti apa gitu dan waktu penyusunan indikator kinerja tadi udah prosesnya udah cukup. Namun tadi tantangannya terkait dengan proses bisnis. **Tapi terkait dengan hal tersebut, saya lihat dari indikator kinerja udah cukup baik dan juga untuk standar biaya kan karena kita memiliki standar biaya masukan dari Kementerian Keuangan dan standar biaya keluaran (SB-6).** Seperti itu kelihatannya kita sudah cukup baik ya karena kita sudah mengikuti sesuai dengan kaidahnya. Untuk evaluasi kinerja kita lihat juga itu kan karena sudah ada, sudah ada aplikasinya baik dari sakti dan seterusnya itu sudah sudah terakomodir*

dengan baik. Nah bahkan di internal BPOM pun untuk terkait dengan indikator kinerja, kita sudah memiliki aplikasi Simetris. Dalam penyusunan perencanaan penganggaran dan juga evaluasi kinerja seperti itu. Juga udah sudah terakomodir dengan e-planning dan standar biaya dan juga dalam pengusulan kegiatan dan anggaran. Kita juga menggunakan indeks gitu. Maksudnya untuk menjadi acuan kita untuk melihat satuan dari masing masing targetnya seperti itu itu secara internal bpom pun sudah menjadi suatu inovasi. Hasil evaluasi kinerja di BPOM juga menjadi dasar dalam pengalokasian anggaran dan kegiatan. Jadi pada prinsipnya kalau menurut saya implementasi penganggaran sinergi udah berjalan dengan baik karena sudah sesuai kaidah bahkan sudah memiliki inovasi-inovasi dalam menilai usulan kegiatan dan anggaran. Untuk optimalisasi dan usulan kegiatan anggaran dari saker kan biasanya sesuai dengan siklus perencanaan tahunan kita membuka kesempatan, atau memberikan akses kepada para unit satker. Perencanaan dalam hal ini untuk penilaian targetnya pada tahunan dan juga nanti untuk pengalokasian anggarannya. Nantinya ya kombinasi dari bottom up dan juga berdasarkan hasil review tentunya dalam dari usulan kegiatan anggaran ini juga nanti akan terutama untuk targetnya. Nanti kan akan dinilai atau direview oleh unit pengampu unit teknis pusat. Misalnya target sampel nanti akan direview targetnya oleh unit pengampu dari kedeputian seperti itu. Nah itu terkait target ya jadi kombinasi antara bottom up dan top down untuk menjadi kesepakatan. Kemudian didesk bersama antara UPT dengan unit pengampunya itu. Baik terkait dengan anggarannya, saya juga sudah lihat cukup baik ya karena kan dari usulan kegiatan anggaran ini kita juga menggunakan yang tadi saya sebutkan menggunakan indeks, jadi kita menjadi acuan kita melihat kalau misalnya naik itu menunjuk harus kita lihat bagaimana apakah kenaikannya itu target kinerja. Kenaikan anggaran itu diimbangi dengan kenaikan target. Biasanya kan gitu mengusulkan naik anggaran, tapi kita lihat mengenai targetnya bagaimana apakah itu kenaikan targetnya sudah selaras itu teman teman dari tim penganggaran sudah melihat itu dengan menggunakan

indeks. Jadi kalau saya lihat dan hal ini sudah terakomodir, namun usulan anggaran dan kegiatan ini belum terakomodir ke dalam satu sistem seperti halnya perencanaan dan evaluasi kinerja yang sudah terintegrasi ke dalam satu sistem Simetris. Kebutuhan dari kita biro perencanaan supaya lebih mudah. Jadi kesimpulannya bahwa ini sudah urusan dalam menilai usulan anggaran. Kegiatan itu sudah cukup baik ya kalau saya lihat. Tinggal nanti. Semakin dipermudah. Maksudnya dengan pengembangan aplikasi gitu dengan simetris itu. Misalnya. Tadi ada cukup menarik itu buat target itu. Direview oleh unit pengampu di kedeputian. Nah berarti disini ada semacam sebuah sistem ya bahwa target itu tidak sepenuhnya berdasarkan dari si satker memang telah direviu oleh kedeputian.

2. *Sejauh mana peningkatan kualitas penyusunan Renstra, Renja dan RKA-KL serta penyempurnaan penerapan penganggaran berbasis kinerja di BPOM. Kalau untuk peningkatan kualitas ya. Saya sampaikan memang untuk perumusan itu teratur itu kita maunya menggunakan baseline dengan tujuan untuk semakin tajam dalam manajemen kinerja. Tapi itu juga lebih ringkas, lebih efisien karena kaitannya nanti dengan kinerja organisasi yang lebih konsisten itu juga dijadikan acuan. Dalam penyusunan skp nya, pimpinan unit kerja jadi harapannya nanti kita bersama pakar atau mungkin nanti menggandeng dari lain yang mungkin, kita bisa studi banding dari Kementerian, lembaga lain yang sudah bisa menerapkan BSC yang sesuai tapi juga bisa mengakomodasi dari logeframe dan juga untuk manajemen kinerja itu seperti apa yang sebaik. Manajemen kinerja berjalan dengan baik, tepat dan tajam, namun juga dalam penyusunan RSPP Lebih komprehensif dalam dilengkap itu dan lebih efektif gitu aja itu sih.*

Transkrip Wawancara Narasumber 3
Redesain Sistem Perencanaan dan Penganggaran Untuk Penguatan Penganggaran
Berbasis Kinerja di BPOM

Nama : Denny Alan, S.Kom (DA)
Jabatan : Analis Anggaran Ahli Madya Biro Perencanaan dan Keuangan
Hari, tanggal : Senin, 25 September 2023
Lokasi : Biro Perencanaan dan Keuangan BPOM

A. Pertanyaan Aspek Redesain Sistem Perencanaan dan Penganggaran

1. Bagaimana proses sinkronisasi penyusunan RENJA dan RKAKL dalam perencanaan dan penganggaran tahunan?

Memang sih sebelum diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2017. Memang sering kita dengar adanya ketidaksinkronan antara renja dan RKAKL, tapi memang saat ini perubahan untuk menjadi lebih baik lagi atau terkait dengan mensinkronkan antara Renja dan RKAKL ini terus dilakukan baik oleh Kementerian Keuangan dan Bappenas karena unit pengampu dari renja dan ini dikelola atau oleh Kementerian yang berbeda. Untuk renja masuk ke Bappenas dan RKAKL dikelola oleh Kementerian Keuangan. Tapi dengan adanya aplikasi sakti saat ini mungkin di tahun 2024 nanti antara renja dan RKAKL sudah menjadi 1 kesatuan. Nah ini diharapkan dengan adanya sinkronisasi di tahap aplikasi ini, bisa menjadi jembatan untuk kami di Badan POM lebih efektif dalam menyusun renja dan RKAKL untuk tidak terjadi tumpang tindih. Mungkin seperti itu karena saat ini memang. Kebijakan terkait dengan penyusunan renja dan ini diampu oleh 2 Kementerian negara yang berbeda. Memang tugas dari Badan POM sendiri lah nanti yang harus melihat kembali atau menyinkronkan kembali. Antara program program yang telah dituangkan di dalam renja juga itupun yang akan ditarik menjadi keluaran yang ada di rkakl.

2. Bagaimana konsistensi dokumen perencanaan, penganggaran sampai evaluasi pada saat tahun pelaksanaan kegiatan?

Baik yang pertama jelas kita butuh komitmen dulu dari pimpinan baik di level tertinggi maupun pimpinan di level unit kerja. Dalam hal ini level eselon 2. Di mana unit di level eselon 2 inilah nanti yang akan melaksanakan program dan kegiatan untuk mencapai outputnya yang telah dituangkan dalam dokumen perencanaan. Nah jadi, dalam rangka konsistensi dan sinkronisasi yang pertama menurut saya memang yang dibutuhkan adalah komitmen dari pimpinan. Nah yang kedua baru setelah adanya komitmen, baru tugas dari masing-masing PIC atau penanggung jawab kegiatan untuk dapat melaksanakan kegiatan berdasarkan arah kebijakan yang telah disepakati, dan berdasarkan target-target yang telah dituangkan di dalam dokumen perencanaan dan juga kita mengacu kepada redesign dari sistem penganggaran itu sendiri. Itu untuk dijadikan acuan dalam melaksanakan kegiatan sampai dengan tahap evaluasi. Nah, ini yang harus dijaga antara arah kebijakan dan pelaksanaannya gitu. Sistem di Badan POM harus mampu akomodir hal hal seperti itu. Turunan aplikasi dari KL maupun renja ke dalam aplikasi yang namanya simetris. Sistem manajemen terintegrasi yang ada di biro perencanaan dan keuangan. Seperti itu. Nah ini yang menjadi apa namanya jembatan dari suatu sistem aplikasi mulai dari tahap perencanaan sampai dengan tahap pelaporan, yang saat ini terus dikembangkan itu dasarnya adalah mengacu ke redesign sistem penganggaran.

B. Pertanyaan Aspek Standar Biaya

1. Bagaimana implementasi standar biaya dalam konsep value for money di BPOM ?

Ya untuk standar biaya ini memang yang diacu oleh Badan POM selaku Kementerian lembaga. Memang ada 2 standar biaya yang pertama adalah standar biaya umum atau SBM yang lebih dikenal dengan gitu ya ini di mana SBM ini dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan, sebagai dasar Badan POM atau seluruh Kementerian lembaga mengacu pembiayaan atau anggaran dalam melaksanakan menyusun kegiatan. Program dan kegiatan

di tahun $n+1$ yang menjadi acuan. Nah ada juga Badan POM ini mengusulkan yang namanya standar biaya keluaran atau SBK. Badan POM ini ada 2 SBK. Yang pertama itu untuk kegiatan dengan output perkara. Kemudian yang kedua terkait dengan rekomendasi kegiatan untuk intelijen (DA-1). Jadi SBK ini memang ada beberapa kriterianya, yaitu yang bersifat berulang gitu. Outputnya ini bisa terukur jelas gitu ya. Sehingga konsep dari value for money ini terkait dengan efektivitas efisiensi. Penggunaan anggaran kemudian akuntabilitas ini bisa dijaga. Makanya untuk 2 hal yang sangat urgent untuk perkara dan rekomendasi dari intelijen tuh di Badan POM ini kemarin diusulkan menjadi standar biaya keluaran. Nah itu yang kami terapkan sebagai implementasi dari konsep value for money, di mana konsep Mengusung dari 3 pilar yaitu indikator kinerja standar biaya dan evaluasi kinerja. Jadi untuk standar biaya sendiri pun Badan POM telah mengimplementasikannya dalam bentuk pengusulan standar biaya keluaran. Memang ada kendala pada saat penyusunan diawal unit-unit menggunakan standar biaya sesuai dengan SBM atau nilai maksimal, namun pada pelaksanaannya mereka melakukan efisiensi sesuai kondisi di lapangan. Sehingga pada saat ada kebijakan realokasi/pemotongan anggaran, target kinerja tidak berkurang karena adanya efisiensi pada saat pelaksanaan tadi (DA-2).

2. Bagaimana menentukan skala prioritas pada saat menyusun anggaran belanja?

Memang apa namanya dengan keterbatasan anggaran ya yang selama ini diterima oleh Badan POM. Jelas skala prioritas ini sangat dibutuhkan. Nah, untuk menentukan dari skala prioritas ini, Badan POM ini telah mempunyai siklus perencanaan penganggaran yang berlaku untuk internal di Badan POM gitu ya. Dalam menetapkan skala prioritas yang pertama, jelas setiap di akhir tahun Badan POM akan melakukan kegiatan yang namanya Evaluasi, Evaluasi dari seluruh kegiatan yang telah dilaksanakan dan telah direalisasikan di tahun berjalan dalam rangka menetapkan arah kebijakan di tahun $n+1$. Nah inilah dimulai dari ini kegiatan evaluasi ini akan dibawa

datanya kedalam rapat kerja nasional. Rapat kerja nasional yang dilaksanakan dengan mengundang seluruh Pimpinan unit kerja di Badan POM untuk bersama-sama mendengarkan arah kebijakan yang akan disampaikan oleh Kepala Badan POM. Nah berdasarkan arah kebijakan itu, nanti seluruh masing masing unit eselon satu menyesuaikan kegiatan-kegiatan prioritas yang akan dilaksanakan di tahun N+1. Nah, jadi kuncinya itu memang kalau di Badan POM kami menetapkan dulu atau merumuskan dulu arah kebijakannya Kepala Badan. Kemudian nanti diturunkan ke dalam kegiatan-kegiatan prioritas di masing masing eselon satunya berdasarkan data dari alokasi anggaran tahun sebelumnya dan realisasi yang telah dilakukan evaluasi. Jadi kita punya siklusnya itu untuk menentukan skala prioritas. Jadi secara tidak langsung Badan POM telah dalam pengalokasian anggaran telah menerapkan prioritas dimulai dari arah kebijakan dan prioritas sampai ke detail dari anggaran tersebut.

3. Dalam pelaksanaan anggaran fokusnya apakah efisiensi belanja atau penyerapan anggaran secara optimal?

Ya mas didi ini yang jadi kendala sebetulnya karena dalam rangka pelaksanaan anggaran. Kementerian Keuangan menerapkan 2 model yang pertama itu mereka punya evaluasi terkait dengan pelaksanaan anggaran yang namanya nilai kinerja anggaran (NKA). Nah di situ ada beberapa indikator dalam rangka menerapkan NKA. Nah kemudian Ditjen Perbendaharaan juga punya yang namanya Indikator kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA), nah yang mas didi tadi tanya ini terkait dengan fokusnya antara efisiensi belanja atau penyerapan anggaran secara maksimal secara optimal. Sebenarnya di 2 kebijakan yang dikeluarkan ini bertolak belakang. Kalau di NKA memang fokusnya itu Kementerian lembaga diminta melakukan efisiensi belanja. Tapi di satu sisi jika Kementerian melakukan efisiensi belanjanya, berarti ada akan ada anggaran yang berlebih. Tapi di sisi lain, Kementerian Keuangan melalui Dirjen Perbendaharaan, juga menilai melalui IKPA. Nah, ini yang dinilai adalah penyerapan yang tertinggi ini yang bisa dikasih reward sama mereka. Ini memang bertolak

belakang. Saya bingung juga menjawabnya kalau begini, tapi yang jelas Badan POM kita akan melakukan, memaksimalkan penyerapan anggaran yang ada di Badan POM. Sekaligus juga kita akan melakukan efisiensi belanja dengan cara melakukan optimalisasi bagi target target yang telah dicapai (DA-3). Tapi masih ada sisa anggaran nah ini yang kita akan lakukan optimalisasi. Untuk memaksimalkan penyerapan anggaran yang ada di Badan POM. Berarti dengan kata lain, maksudnya, apabila sisa unit diminta untuk menaikkan targetnya mencapai target yang mungkin lebih bisa dicapai untuk menaikkan target. Atau kalau ada kebijakan baru dari pimpinan juga bisa gitu.

D. Pertanyaan Aspek Penganggaran Berbasis Kinerja

1. Bagaimana implementasi penganggaran berbasis kinerja yang terdiri dari tiga pilar yaitu indikator kinerja, standar biaya dan evaluasi kinerja di BPOM?

Untuk penganggaran berbasis kinerja ya memang betul mas didi ini diperlukan 3 instrumen untuk mewujudkan penganggaran berbasis kinerja. Yang pertama indikator kinerja, yang kedua standar biaya yang ketiga evaluasi kinerja. Dan penganggaran berbasis kinerja ini. Kalau dikita biasa kita kenal ini adalah yang diminta oleh Kementerian Keuangan bagi seluruh Kementerian lembaga untuk menerapkan PBK dalam rangka pendekatan penganggaran. Yang bertujuan yang pertama untuk meningkatkan akuntabilitas, efisiensi dan efektivitas dengan menekankan setiap penggunaan anggaran negara harus mempunyai nilai manfaat yang terukur bagi peningkatan kehidupan masyarakat. Nah ini yang nanti ditarik ke atas menjadi value for money. Nah untuk itu, setiap perencanaan anggaran ini harus dapat jelaskan hubungan antara biaya yang dibutuhkan dengan ekspektasi hasil yang akan dicapai dalam suatu pengeluaran Kementerian lembaga. Nah, yang mana kegiatan aktivitas harus dibiayai dan harus menghasilkan keluaran output yang pada akhirnya menjadi gabungan dari beberapa keluaran. Dalam suatu program untuk mendukung pencapaian hasil atau outcome yang diinginkan jadi di Badan POM sendiri. Kalau

terkait dengan indikator kinerja standar biaya dan evaluasi kinerja ini sesuai dengan siklus nasionalnya yang dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan dan Bappenas mulai dari penyusunan indikator kinerja penyampaian pengusulan standar biaya di masing masing Kementerian lembaga. Dalam hal ini Badan POM kemudian dari evaluasi kinerjanya ada NKA dan IKPA gitu ya ini telah dilakukan oleh Badan POM. Di dalam rangka mendukung capaian hasil outcome dari institusi Badan POM sendiri. Tapi memang kalau ditanya udah maksimal apa belum gitu ya? Kalau berdasarkan evaluasinya Badan POM sendiri mulai tahun 2021 dan 2022 nilai kinerja anggaran dan IKPA ini ada di 5 besar.

2. Bagaimana penerapan konsep money follow program di BPOM?

Ya untuk apa namanya penerapan konsep money follow program. Iya seperti yang tadi juga sudah saya jelaskan bahwa memang penyusunan program dan anggaran yang ada di Badan POM ini telah mempunyai suatu siklus ya suatu siklus mulai dari perencanaan sampai dengan tahapan evaluasi. Tapi memang ke depannya. Program yang ada di Badan POM ini pemanfaatannya lebih kepada tujuan akhirnya value for money itu sesuai dengan kebijakan Kementerian Keuangan. Manfaat dari dari uang itu yang dikeluarkan itu itulah yang dimanfaatkan untuk apa ya. Untuk mencapai keluaran yang ada di Badan POM, tapi konsep money follow program yang sebelumnya ini. Kalau nggak salah sekarang memang yang digembarkan ini udah bukan program, tapi perlu pemahaman saja. Tapi kalau konsep money follow program sendiri dari awal. Kebijakan konsep ini dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan. dimulai melakukan perubahan dalam pengusulan atau penyusunan kegiatan dan anggaran. Jadi kalau konsep money follow program sendiri itu bagus.

3. Menurut Bapak sejauh mana optimalisasi Biro Perencanaan dan keuangan BPOM dalam menilai usulan Anggaran dan Kegiatan dari Satker?

Sebetulnya tugas paling berat dari Biro perencanaan dan keuangan ini dalam rangka melakukan review. Ya melakukan review terhadap optimalisasi yang ada dalam rangka penyusunan kegiatan dan anggaran. Dalam rangka

mereviu usulan kegiatan acuan kami di Badan POM adalah seluruh peraturan yang berlaku, yang terkait dengan penyusunan dokumen RKAKL maupun dokumen RKP yang jadi acuan. Jadi kami Biro Perencanaan dan Keuangan juga telah mengeluarkan keputusan Kepala Badan POM terkait dengan penyusunan perencanaan, rencana kerja dan penetapan anggaran itu. Jadi semua akan mengacu ke sk itu, yang jelas dokumen yang harus diacu adalah RKP internalnya BPOM renstranya Badan POM renjanya Badan POM. Kemudian yang disusun berdasarkan hasil dari evaluasi kinerjanya. Terutama untuk unit UPT BPOM yang pembagian pagu anggarannya merupakan kewenangan Biro perencanaan dan keuangan, kami sangat memperhatikan usulan mereka berdasarkan hasil kinerja tahun sebelumnya, sedangkan untuk unit pusat pagu anggarannya langsung dibahas pada saat trilateral meeting (DA-4). Jadi kalau secara peraturan jelas Badan POM telah pasti mengikuti peraturan yang berlaku. Badan POM juga dari seluruh peraturan eksternal yang ada itu menetapkan kembali menjadi 1 kebijakan atau keputusan kepala Badan POM yang diberlakukan di internal Badan POM dalam rangka menyusun rencana kerja dan penetapan anggaran. Namun ada kendala sejak Tahun 2021 di Badan POM ini sampai dengan saat ini sedang melakukan restrukturisasi organisasi. Nah restruktur organisasi dimulai pada tahun 2020. Dimana Badan POM ini telah ada di 40 Kabupaten kota, yang yang dibentuk dengan nama loka POM. Loka POM ini ini akan terus dilakukan reorganisasi sehingga loka ini setidaknya akan ditingkatkan lagi menjadi balai. Nah di tahun 2023 ini, ada 8 loka yang ditingkatkan jadi balai. Nah inilah kendala kendalanya sebetulnya yang ada karena informasi terus berkembang organisasinya. Jadi dalam rangka restrukturisasi organisasi ini pun akan yang jelas pasti akan menyesuaikan. Dokumen perencanaannya dokumen RKP, Renjanya bahkan mungkin sampai Renstranya itu akan menyesuaikan karena adanya restrukturisasi organisasi (DA-5).

4. Sejauh mana peningkatan kualitas penyusunan Renstra, Renja dan RKA-KL serta penyempurnaan penerapan penganggaran berbasis kinerja di BPOM
Memang yang yang masih dibutuhkan di Badan POM adalah, komitmen yang tinggi dari pimpinan. Gitu aja karena kalau seluruh pimpinan ini melaksanakan komitmennya, kami yang di level elaksana lebih mudah untuk melaksanakan penyusunan dokumen dokumen perencanaan penganggaran (DA-6).

POLITEKNIK
STIA LAN
J A K A R T A

Transkrip Wawancara Narasumber 4
Redesain Sistem Perencanaan dan Penganggaran Untuk Penguatan Penganggaran
Berbasis Kinerja di BPOM

Nama : Nyimas Fauziah Alfi, S.Farm, Apt.,M.E (NF)
Jabatan : Perencana Ahli Madya Biro Perencanaan dan Keuangan
Hari, tanggal : Rabu, 27 September 2023
Lokasi : Biro Perencanaan dan Keuangan BPOM

A. Pertanyaan aspek Redesain Sistem Perencanaan dan Penganggaran

1. Bagaimana proses perumusan nomenklatur program, Kegiatan, Output dan Outcome dalam penerapan RSPP di Badan POM?

Terima kasih jadi terkait RSRP di Badan POM kalau kita membaca RSPP ini kan kita mengacunya kepada logical framework, jadi di Badan POM sendiri dalam penyusunan RSPP itu kita mengacunya kepada Balance Scorecard. Sehingga kita tidak melihatnya indikator-indikator itu sebagai ada level outcome output ataupun kegiatan. Jadi kita melihatnya itu dari perspektif (NF-2). Apakah itu perspektif stakeholder perspektif, Internal proses dan LG. Jadi di sini kalau saya lihat sih memang ada perbedaan yang dalam kita melakukan merumuskan dengan adanya RSPP. Di BSC itu semua indikator itu, kita menganggapnya itu adalah indikator kinerja utama. Padahal kalau dari RSPP kita harus ada levelling ya mana outcome, mana output mana kegiatan itu mungkin yang menyebabkan ada permasalahan itu (NF-3). Mungkin itu yang menjadi penyebab kita tidak capai target yang ditetapkan. atau memang karena kita kurang kurang detail ya dalam penyusunan nomenklatur. Karena kan kita ketahui terkait dengan program sebenarnya di Badan POM tidak berubah dari sebelum adanya RSPP dan setelah adanya RSPP. Karena di Badan POM sendiri program itu program teknis itu hanya ada satu program pengawasan obat dan makanan (NF-1). Cuma mungkin memang yang ada perbedaan itu adalah adanya di level output, kegiatan dan outcome.

2. Bagaimana proses sinkronisasi penyusunan RENJA dan RKAKL dalam perencanaan dan penganggaran tahunan? apakah berdampak terhadap proses evaluasi kinerja?

*Iya betul jadi yang sudah biasa kita lakukan itu kan ada evaluasi. Kita sudah memiliki aplikasi simetris itu untuk mengukur kinerja organisasi sampai level dibawahnya itu. Mulai dari level eselon satu level eselon 2. Nah di situ kan bisa terlihat ternyata untuk level eselon satu itu ada kinerja yang istilahnya merah, dia tidak tercapai target kinerjanya tapi ternyata di level eselon duanya itu tidak terlihat masalah itu. **Jadi bisa dilihat itu memang jadi terlihat tidak sinkron ya dari output-output dari direktorat itu semuanya bagus. Tapi ternyata di level eselon satu itu ternyata ada yang enggak tercapai gitu. Nah itu kan di situ jadi terlihat adanya ketidaksinkronan ya (NF-6). Harusnya kalau di level output di level eselon 2 itu semuanya hijau, harusnya kan nanti di level eselon satunya itu harusnya kan semuanya itu juga hijau atau tercapai. Tapi ternyata di badan ini masih ada ada seperti itu. Masih ada ketidaksinkronan itulah bisa kita lihat gitu karena dalam pedoman RSPP itu dalam penyusunan informasi kinerja itu harus terkait atau akan mempengaruhi langsung terhadap pencapaian dari sasaran kegiatan. Sedangkan penyusunan sasaran kegiatan itu harus terkait langsung terhadap pencapaian dari sasaran program tersebut. Harusnya ada hubungan secara langsung atau kesinkronan antara level-levelnya***

3. Bagaimana menjaga konsistensi dokumen perencanaan, penganggaran sampai evaluasi pada saat tahun pelaksanaan kegiatan?

Jadi memang ini kuncinya kita dari perencanaannya. Walaupun kita menggunakan Balance Scorecard, tapi memang mungkin untuk membuat menjembatani antara BSC dan RSPP. Ini mungkin kita harus menyusun suatu dokumen gitu ya yang bisa kayak melinkan gitu. Jadi bisa lebih terlihat keterkaitan antara output-output ini dengan outcome nya. Karena saat ini kan kalau hanya menggunakan BSC saja itu jadi enggak terlihat secara langsung keterkaitan. Dari output-output itu terhadap pencapaian

program dan juga ada yang dengan BSC ini juga menyebabkan ada outcome outcome ada IKU yang tidak teranggarkan lah istilahnya. Ya tidak ada kegiatan yang bisa mendukung dari outcome tersebut karena itu levelnya udah di luar dari unit tersebut gitu ya (NF-4). Nah, itu mungkin kita perlu menyusun satu dokumen itu lah yang bisa menjembatani antara yang kita sudah susun dengan BSC ini supaya terlihat keterkaitan gitu. Berarti kuncinya memang ada di perencanaan awal itu agar sinkron dengan rancangan tahunan itu perlu suatu dokumen jembatan yang jembatani kaitannya agar ke ada konsistensi dari renstra sampai dengan ke tahunnya.

B. Pertanyaan Aspek Indikator Kinerja

1. Bagaimana penerapan *logic model* dalam penyusunan informasi kinerja sesuai RSPP di BPOM? Apakah ada keterkaitan capaian kinerja RO dengan capaian Kinerja sasaran Strategis? karena sesuai pedoman RSPP indikator kinerja RO haruslah mendukung ketercapaian output program s/d sasaran strategis

kita sebenarnya dalam penyusunan logic model itu kita menggunakan balanced scorecard, jadi di situ memang enggak terlihat secara detail ya. Jadi dukungan dari capaian capaian output terhadap capaian kinerja sasaran strategis jadi kan yang sesuai tadi disampaikan. Ternyata di dokumen kita itu ada gap ya. Itu tadi ada ketidak sinkronan sih mungkin.

Harusnya memang pada waktu kita menyusun perencanaan itu, memang kita harus mengacu kembali kepada prinsip itu bahwa memang ada level-level output, jadi bisa biar bisa terlihat lebih jelas keterkaitan dari pencapaian RO terhadap terhadap sasaran strategis kita gitu. Karena pada waktu perencanaan itu tidak sampai sedetail itu ya kita memetakan. Antara sasaran strategis dan dukungan terhadap RO. Mungkin yang perlu kita buat pemetaannya (NF-5)

C. Pertanyaan Penganggaran Berbasis Kinerja

1. Bagaimana implementasi penganggaran berbasis kinerja yang terdiri dari tiga pilar yaitu indikator kinerja, standar biaya dan evaluasi kinerja di BPOM?

Penganggaran berbasis kinerja ini sudah kita terapkan ya di Badan POM. Tapi memang dari hasil evaluasi tuh bisa kita lihat di atas kertas itu semua indikator tercapai dengan baik dan anggaran terealisasi dengan sangat baik jadi tren selama 3 tahun terakhir ini, terdapat tren peningkatan untuk realisasi anggaran kita. Terakhir itu sudah sampai 99,15% kalau nggak salah. Nah itu di atas kertas bagus. Tapi dari hasil evaluasi kita di lapangan, kalau kita melakukan diskusi dengan para pegawai yang ada di Unit kita itu selalu ada keluhan kekurangan anggaran. **Nah terus yang kedua permasalahan kedua mereka itu takut khawatir ada target yang tidak tercapai, terutama untuk RO PN yang memang sangat dipantau (NF-7).** Jadi itu kayak 2 hal yang berbeda gitu. Jadi dari satu sisi mereka harus ada target yang tercapai. Jadi mereka istilahnya tuh udah jungkir balik lah mengoptimalkan anggaran yang ada. Untuk bisa mencapai target tersebut. Padahal secara idealnya itu harusnya itu kurang anggaran yang kita alokasikan gitu. Jadi masih ada itu ya data yang berbeda ya data di atas kertas dan data riil di lapangan. **Nah itu yang kami lihat sih kalau dari evaluasi yang selama ini begitu ya. Antara penyusunan di awal anggaran dengan kebutuhan target kinerja dengan realisasi akhir berbeda. Walaupun anggaran turun tapi tak ada target kinerjanya tetap tetap tidak turun. Itu karena tadi ada perasaan takut kinerja turun dari si penyusun anggaran kegiatannya buat target tidak tercapai ya dia menerapkan target yang mungkin di bawah itu iya, atau mungkin juga targetnya sudah ada, itu dia jadi harus merelokasi sumber daya dari tempat lain atau juga mungkin kualitas dari pencapaian target itu yang dikurangi. Jadi jadi mereka lebih mengejar kuantitas tapi dari kualitas dari pencapaian output itu (NF-6).**

2. Sejauh mana penyusunan dokumen RKA-K/L telah mengacu pada sasaran dan target Kinerja pada dokumen RKP, Renstra maupun Renja K/L, dan evaluasi Kinerja?

Iya. Jadi saat ini sih kalau saya melihat sebenarnya dalam penyusunan dokumen RKAKL ini kita sudah jauh jauh lebih baik dibandingkan

sebelumnya. Kita sudah dalam menyusun dokumen rka itu, kita sudah melihat evaluasi dari tahun berikutnya. Kemudian kita juga sudah mensinkronkan dengan target yang ada di renstra dan itu semua kita evaluasi ya karena evaluasi yang kita lakukan itu misalnya kita mengevaluasi di tahun ketiga kemarin. Yang ketiga pelaksanaan RENSTRA kita sudah mengevaluasi mereview ya itu di situ kita sudah. dalam rangka peningkatan kualitas penyusunan renstra renja dan serta penyempurnaan dalam penerapan penganggaran khusus kinerja di Badan POM itu tadi.

3. Sejauh mana peningkatan kualitas penyusunan Renstra, Renja dan RKA-KL serta penyempurnaan penerapan penganggaran berbasis kinerja di BPOM?
Ya mungkin selain dari perbaikan, mulai dari proses perencanaan kita. Kemudian juga pada waktu kita menyusun RKALK itu lebih banyak lagi kayak apa ya, SBK-SBK gitu loh. Jadi ya kan kita kan saat ini baru ada SBK terkait penindakan mungkin apa alangkah lebih baiknya kita bisa punya SBK nanti pada waktu kita mengeluarkan berkas registrasi, dalam menyusun standar, itu pasti akan sangat membantu dalam kita menyusun.RKAKL gitu jadi misalnya kalau ada pemotongan anggaran dengan adanya SBK lebih jelas ya jadi isu yang tadi tuh ternyata dengan anggaran yang berkurang pun ternyata output tetap tercapai. Nah dengan adanya SBK itu tadi kan harapannya lebih ideal. Ya kita menganggarkan, jangan-jangan selama ini kita menganggapnya gedean. Gitu sih.

Transkrip Wawancara Narasumber 5
Redesain Sistem Perencanaan dan Penganggaran Untuk Penguatan Penganggaran
Berbasis Kinerja di BPOM

Nama : Ali Yudhi Hartanto, SF, Apt, MM (AY)
Jabatan : Kepala Bagian Tata Usaha Inspektorat Utama
Hari, tanggal : Senin, 2 Oktober 2023
Lokasi : Ruang Kepala Bagian TU Inspektorat Utama BPOM

A. Pertanyaan aspek Redesain Sistem Perencanaan dan Penganggaran

1. Bagaimana proses perumusan nomenklatur program, Kegiatan, Output dan Outcome dalam penerapan RSPP di Badan POM?

Ya baik terima kasih mas didi. Terima kasih juga atas kesempatan berikan kepada saya untuk ikut terlibat dalam penyusunan tugas penelitiannya. Iya, saya akan jawab sesuai dengan apa yang saya pahami dan pengalaman kami berinteraksi dengan program perencanaan penganggaran dengan kami di inspektorat utama. Nah, tanggapan kami atas redesign sistem perencanaan penganggaran mungkin sudah hampir 17 tahun. Dalam kurun waktu perjalanan tersebut memang terlihat adanya suatu perubahan dalam proses perencanaan penganggaran untuk Kementerian lembaga. Di awal sekali proses perencanaan itu. Seingat saya adalah, kita mendapatkan alokasi-alokasi khusus ya pagu pagu anggaran dan kemudian kita secara internal di Badan POM diminta untuk membaginya berdasarkan unit-unit yang ada. Jadi, unit di inspektorat itu dulu dapat sekitar 600 sampai 800 jutaan lah kurang lebih di sekitar itu. Belakangan program perencanaan itu yang saya amati adalah mengikuti apa yang ditugaskan ke instansi tersebut, atau mengikuti tugas pokok dan fungsinya. Mana yang jadi tugas pokok utama dan mana yang menjadi tugas pokok dan pendukung. Dalam proses perencanaan dan perumusan nomenklatur, yang saya tahu adalah instansi kemudian menyusun yang namanya rencana strategis dalam program 5 tahunan. Jadi tahun ke 0 sampai dengan tahun kelima. Di dalam renstra itu

akan dicantumkan tupoksinya apa kemudian mandatorinya. Tujuan sasaran dan kemudian indikator kinerja utama. Nah dari indikator kinerja utama itulah kemudian disusun targetnya, disusul target-target penganggaran. Nah setelah disetujui, maka instansi kemudian berkomunikasi dengan mitranya apakah itu di Bappenas ataupun di Kementerian Keuangan untuk kemudian mengusulkan anggaran untuk menjalankan tupoksinya. Nah kemudian Bappenas akan mendiskusikan dengan Badan POM dan Kementerian Keuangan terkait dengan program kegiatan dan kemudian kesediaan anggarannya. Baru kemudian ditetapkanlah jumlah jumlah anggaran tertentu untuk suatu unit organisasi tertentu. Dari jumlah agar didapat tersebut kemudian. Gitu. Oh satu hal lagi ada beberapa indikator-indikator kinerja yang menjadi fokus dari ke dari program pemerintah di 5 tahun ini. Misalkan untuk Badan POM yang dijadikan fokus adalah yang sekarang sedang diangkat. Misalkan penanganan stunting gitu ya. Apa yang jadi kontribusi Badan POM dalam penanganan stunting dan itu kemudian ditandai oleh Bappenas bahan bahan pangan mana saja yang perlu di awasi. Nah, ada 3 komoditi pangan yang kemudian menjadi fortifikasi ataupun intervensi gizi dari pemerintah ke masyarakat. Yang pertama adalah tepung yang kedua adalah minyak goreng, dan garam beryodium. Nah penanganan program dukungan stunting Badan POM berpusat pada 3 hal ini fortifikasi pangan kemudian sampling 3 produk tadi. Kemudian di luar itu juga ada KIE masyarakat terkait dengan stunting dan kualifikasinya juga bisa. Jadi menurut saya perumusan nomenklatur program, kegiatan dan output di BPOM ini sudah tepat dan sesuai dengan RSPP dan prioritas pemerintah saat ini.

2. Bagaimana proses sinkronisasi penyusunan RENJA dan RKAKL dalam perencanaan dan penganggaran tahunan?

Iya jadi, yang saya tangkap adalah karena ini benturan kewenangan antara Kementerian mitra strategis Badan POM, antara Bappenas dan Kementerian Keuangan ya mungkin sumbernya mungkin dari situ. Hal yang kedua adalah bahwa proses penetapan anggaran itu. Jadi di tahun 2020 3

ini kita sudah memprogram atau merencanakan kegiatan sampai di tahun 2024 gitu ya. Proses penganggarannya tahun depannya lagi 2024 untuk anggaran 2025 itu dalam masalah kedua. Jadi memang update data ataupun update informasi informasi program, kemudian disposisi arahan pimpinan arahan presiden itu menjadi terlambat dibandingkan proses pembahasan perencanaan anggarannya itu. Jadi untuk Renstra dan Renja itu semua domain Bappenas. Dikunci dari penetapan renja 5 tahunan di Renstra, tapi dia untuk target-targetnya adalah renja. Sebenarnya dalam perjalanannya, namanya proses perencanaan itu kan sebetulnya kita visualisasikan apa yang belum terjadi. Dalam perjalanan tentu ada perubahan-perubahan situasi strategis, ada perubahan arah prioritas dan lain-lain. Nah seharusnya mungkin sebaiknya restra itu bisa dilakukan adjust revisi sehingga bisa mengikuti. Tapi yang sekarang yang sekarang terjadi adalah tidak terjadi seperti itu. Jadi renstra tidak bisa direvisi sepanjang tidak ada kriteria yang bisa dijadikan justifikasi. Akibatnya, renjanya juga tidak bergerak gitu ya. Jadi statis, padahal kita tahu satu tahun itu waktu yang lama, karena adanya perubahan strategis. Kemudian Kementerian Keuangan juga memiliki indikator lainnya yang disebut KRO RO. Yang terkadang angka-angka yang dalam RKAKL itu berbeda dengan angka yang di renstra. Jadi rupanya yang saya pahami kesepakatan antara Bappenas, Kemenkeu. Itu lebih terletak pada besaran pagu anggaran di instansi. Begitu dia masuk ke unit. Sudah mulai sulit itu dibagi program sudah mulai sulit lagi. Itu adalah menurut saya. Tumpang tindih kewenangan. Kemudian mungkin saya tambahkan sedikit lebih profesional itu disusun di awal tahun, jadi ending satu dan detail satu untuk program pembahasannya. Indonesia dan dia bisa sampai dengan detail sampai dengan rincian. Jadi ada komponen super dengan rincian apabila kebijakan ini dievaluasi. Menjadi kewenangan penuh dari Kementerian untuk bisa menyusun sampai dengan komponen itu. Menurut saya lebih baik ya, mungkin begitu

3. Bagaimana penerapan *logic model* dalam penyusunan informasi kinerja sesuai RSPP di BPOM?

Terkait dengan penerapan logic model dalam penyusunan informasi kinerja yang sesuai. Di Badan POM menurut pengalaman pribadi sebagai auditor apip. Bahwa dalam penyusunan renstra di Badan POM itu kan lebih ke memakai aspek, sedangkan dalam pelaksanaannya itu Kementerian seperti Bappenas dan Menpan mengevaluasi itu sesuai dengan. Pohon kinerja/ kerangka logis bagaimana keterkaitan antara, mulai dari tadi komponen-komponen nya apakah terkait langsung atau tidak terus terkait langsung dengan output dengan kegiatan. Kalau kegiatan itu ada di level eselon duanya. Terus apakah kegiatan eselon 2 ini mendukung program-programnya Badan POM. Iya disatu sisi BSC itu merupakan suatu hal yang baik karena dia melihat keseimbangan Antara perspektif. Mitra, customer perspektif, operasional. Produksi gitu ya perspektif keuangan. Jadi melihat adanya keseimbangan itu begitu dalam satu unit unit terkecil. Apakah kemudian ini berlawanan dengan logical framework yang kemudian menjadi dasar dalam penyusunan SAKTI. Hemat saya Dia harus ada trade off, trade off nya adalah logika framework kita melihat satu batang tumbuhan gitu ya. Kemudian menyebar karena tindakan dan seterusnya (AY-1). Balance Scorecard mirip seperti itu apabila kita petakan pada perspektif stakeholders dan internal proses itu sebetulnya dari logika Framework. Bahwa kemudian ada perspektif keuangan perspektif SDM. Itu menjadi penguat dari logika framework karena bagaimanapun untuk bisa mendapatkan internal proses yang berjalan dengan baik, menyediakan produk ataupun menyediakan jasa ataupun memberikan pelayanan. Itu haruslah didukung dengan kompetensi yang baik juga harus didukung dengan SDM yang kompeten gitu ya, sehingga internal posisi yang baik di level produk yang baik. Masyarakat yang dilayani customer design. Kemudian mempersepsikan kerja tersebut baik. Jadi kalau saya ditanyakan apakah kemudian BSC Berbeda dengan logika model menurut saya tidak, perspektif saya adalah intinya itu pada stakeholders dalam proses adalah logika nya, kemudian aspek keuangan aspek sdm. Memperkuat bisa berfungsi lagi. internal proses itu dukungan ya

itu kan aspeknya. Biasanya kan keuangan itu juga mendukung. Ya kalau dalam kerangka logis internal prosesnya adalah inputnya, iya lebih input inputnya. Sedangkan outputnya itu ada di stakeholder perspective. Jadi dia memperkuat logika bahkan memperkaya.

4. Sejauh mana penyusunan dokumen RKA-K/L telah mengacu pada sasaran dan target Kinerja pada dokumen RKP, Renstra maupun Renja K/L, dan evaluasi Kinerja?

Pengalaman saya dalam mereview dokumen-dokumen tersebut memang belum memiliki konsistensi atau keterkaitan antara semua dokumen tersebut. Ya kalau saya dimintakan saran agar dokumen perencanaan, penganggaran sampai evaluasi dari konsistensi tinggi yang pertama pasti. Logframe tadi jalan dulu, dari level satu eselon satu dan seterusnya. Kalau itu semua sudah sinkron level dibawahnya mendukung level diatasnya. maka itu planning, organizing, controlling di level terkecil itu sebenarnya bisa sinkron. Karena kita memastikan itu semua akan mengalir ke atas. Mungkin pertama kita pastikan dulu nya dengan skema apapun itu berjalan dengan baik. Kemudian yang kedua adalah. Selain logframe, kita harus bisa memastikan bahwa plan actuating organisasi kontrol tadi berjalan dengan baik. Bahwa unit tersebut memiliki perencanaan yang digambarkan dalam renstra renja. Kemudian dia membagi orang yang kompeten untuk tugas tersebut, kemudian ada dukungan sumber daya. Jadi ada organizing gitu ya, ada waktu yang cukup bagi dia melaksanakan dan terakhir dia harus melakukan kontrol. Dia secara internal melakukan evaluasi mandiri lah. Kemudian hal yang ketiga adalah dia harus melakukan pelaporan kerja secara rutin yang kemudian pelaporan kinerja tersebut harus bisa dievaluasi oleh unit lain yang terpisah oleh mereka. Apakah itu menjadi bagian dari manajemen, misalkan di biro perencanaan keuangan, misalkan fungsi manajemen gitu ya. Dan kemudian juga bisa dilakukan evaluasi oleh unit apipnya, tanpa adanya intervensi dari manajemen. Mengapa itu menjadi penting karena kalau kita tidak pernah bisa mengukur sesuatu proses secara profesional secara independen begitu ya, maka sebetulnya kita tidak pernah bisa

menentukan keberhasilan suatu program. Enggak pernah bisa dievaluasi. Nah gitu ya untuk. Bisa dilakukan konsistensi dan sinkronisasi yang terakhir evaluasi ini walaupun dilakukan dengan baik tapi tidak bisa dieksekusi percuma juga seperti yang saya sampaikan tadi di awal. Kalau kita tidak pernah diberi kesempatan untuk melakukan review evaluasi renstra, kemudian ada perubahan dari renstra ya, evaluasi tingkat program sebaik apapun percuma. Percuma jadi kembali lagi ke diskusi tadi di awal. Setelah kita nilai sistem pokoknya planning organizing, controlling ada evaluasi, ada masukan feedback dan masukan itu harus bisa dieksekusi. Kalau tidak bisa dieksekusi karena tidak bisa diubah Renstra jadi gimana juga, gitu sih.

B. Pertanyaan Aspek Standar Biaya

1. Bagaimana Pendapat Bapak terkait konsep value for money? Sejauh mana implementasinya di BPOM

Nah tugas utama dari apip itu kan memang menilai bagaimana kelayakan sebuah standar biaya ya. Bahkan apip atau auditor itu kan mempunyai tugas audit kinerja yang berdasarkan pada 3E, efektif, efisien, dan ekonomis. Standar kenapa itu kan ujung atau salah satu tools untuk mencapai Kinerja Pertama adalah standar biaya standar biaya masukan dan standar biaya keluaran juga usulan dari usulan Badan POM. Pandangan saya adalah standar biaya masukan tersebut terlalu umum, dan belum mempertimbangkan fokus prioritas pemerintah mau ke mana? Tadi saya sampaikan misalkan fokus ke penanganan adalah pengentasan kemiskinan, Seyogyanya Standar Biaya tadi mengatur untuk program prioritas nasional itu diberikan fleksibilitas pola anggaran yang lebih besar. Sehingga orang tidak merasa terpaksa menjalani itu dengan nilai kecil. Karena ini bisa mendukung. Pencapaian program yang lebih baik. Penetapan standar biaya oleh kementerian juga terlalu rendah. Mungkin itu dari sisi standar biaya kalau dari sisi value for money, saya lebih mendukung value program. Penggunaan standar biaya untuk mencapai target kinerja juga harus didalami dulu, targetnya bentuknya seperti apa ya. Misalnya di Badan POM banyak tempat seperti kegiatan pengawasan yang lainnya. Pengawasan

sarana misalnya gitu ya, apakah pengguna anggaran sebesar sekian itu untuk suatu saat pengawasan satu sarana itu telah pas atau sebenarnya, atau bisa lebih turun dari itu. Jadi mungkin untuk beberapa unit ini sudah kita anggap berhasil, tapi untuk yang lain perlu kita sikapi dengan hati. Karena targetnya adalah target volume biasa. Kita juga harus melihat aktivitas yang tadi begitu. Apakah aktivitas tadi mendukung target, ya itu yang harus kita lihat. Kemudian hal lain adalah apabila ada tambahan anggaran, kemudian penurunan anggaran targetnya tetap tercapai. Ini menjadi suatu apakah target tadi sudah diletakkan tepat. Selain tadi yang disampaikan paling program saya mungkin disepakati itu juga perlu adanya suatu entah itu apa ya, belum ada saya lihat di pemerintah yang dia bonus. Insentif, insentif ini tadi diberikan target yang berat, misalkan targetnya harus selesaikan 100 dokumen perkara. Dia bisa selesaikan itu dengan anggaran 70. Maka yang 10% dikembalikan ke negara yang 20% dijadikan insentif. Jika ini bisa diterapkan menurut saya akan terjadi penghematan luar biasa dari sisi penganggaran dan juga menjadi sisi rasionalisasi. Misalnya dari unit satu unit penyusunan standar gitu ya. Targetnya 5 standar dengan 5 miliar anggaran. Karena sekarang tidak ada informasi seperti ini, maka dia berusaha mendapatkan 5 output pedoman atau standar ataupun 6 yang lebih tinggi. Dia selaku aktivitas sebelum menghabiskan anggaran satu miliar. Itu kan. Dilakukan FGD dilakukanlah benchmark, dilakukanlah kajian-kajian di kantor, di luar kantor dan sebagainya. Kan gitu ya, sehingga output yang 5 tadi tercapai dengan revisi anggaran 100%. Kan gitu ya, nah itu berarti kamu tidak secara efisien. Kalau kita ingin mendapatkan optimal tadi, efektif dapat efisien. Bagaimana bila kita tidak tahu itu sebetulnya kebutuhannya berapa? Dengan menerapkan kebijakan ini. Kalau mungkin ya, mungkin juga kalau bikin bisa saat dia akan mulai melakukan pendalaman. Apakah diperlukan 4 kali pertemuan, jangan-jangan cuma satu kali selesai uji publiknya, apakah perlu langsung 10 kota, jangan-jangan tidak. Kan gitu ya yang dijaga tetap kualitas. Jangan-jangan dengan mengundang 5 orang ahli datang ke kantor itu sudah mewakili uji publik ke

masyarakat yang tidak tahu sama sekali gitu ya sehingga posisi turun jadi misalkan 3 Miliar.

C. Pertanyaan Penganggaran Berbasis Kinerja

1. Bagaimana implementasi penganggaran berbasis kinerja yang terdiri dari tiga pilar yaitu indikator kinerja, standar biaya dan evaluasi kinerja di BPOM?

Iya, jadi saya pakai penilaian instan aja ya. Jadi dari Kementerian PAN RB. Kemenpan RB itu menilai SAKIP kita kan. Nilai SAKIP kita 84 ya mas didi. Jadi dengan menggunakan penilaian rekan-rekan dari Menpan, saya bisa menyampaikan bahwa proses perencanaan kinerja Badan POM dari mulai Renstra renja dan seterusnya, kemudian pengukuran kinerja menetapkan indikator kinerja sudah dilakukan proper gitu ya. Kemudian pelaporan kinerja kita ada beberapa aplikasi, yang dipantau dan dilaporkan setiap bulan. Evaluasi kinerja kita juga melakukan penilaian. Capaian kinerja kemudian bisa diukur secara objektif. Jadi saya bisa menyampaikan, bahwa implementasi penganggaran sampai dengan implementasi kegiatan sampai dengan pelaporan untuk indikator kinerja, dan evaluasi kinerja di BPOM sudah berjalan dengan baik. Hanya masalahnya tadi apakah kemudian informasi kinerja ini bisa merubah renstra dan renja. Itu saja sih kemudian standar biaya, tadi saya sampaikan. Standar biaya ini karena dipukul rata gitu kan ya, untuk semua KL untuk semua daerah mungkin perlu dilakukan peninjauan. Tadi saya sampaikan kalau bisa untuk prioritas nasional dibedakan satu biaya untuk daerah daerah tertentu dibedakan lagi sebenarnya. Tapi kan kalau ada standar biaya yang mungkin bisa menguntungkan bagi pegawai. Gitu sih

2. Sejauh mana peningkatan kualitas penyusunan Renstra, Renja dan RKA-KL serta penyempurnaan penerapan penganggaran berbasis kinerja di BPOM
Kalau sekarang terkait dengan peningkatan kualitasnya, penyusunan renstra serta penyempurnaan penerapan. Dari diskusi kita tadi saya mungkin bisa menyampaikan poin poin dari kami ya untuk proses Redesign.

Adanya waktu yang tidak cukup untuk mengevaluasi sampai detil dan tidak diberikannya revisi. Kemudian bagaimana peningkatan kualitas ya tadi kembali lagi, kalau boleh itu bisa dilakukan akan lebih baik. Jadi evaluasi tadi memang ada feedbacknya. Untuk bisa dilakukan perbaikan. Kemudian dalam penyusunan renstra untuk depan, dalam penyusunan restra yang diajak bicara itu sebaiknya luas, tidak hanya Bappenas sebagai pengampu perencanaan nasional. Tetapi juga melibatkan tokoh-tokoh masyarakat. Juga melibatkan mitra kita dalam melakukan aktivitas pengawasan. Maksud saya begini. kalau kita diskusi dengan Bappenas, maka mereka itu akan berpacu pada RPJMN gitu kan ya visi presiden dan sebagainya. Meskipun ada masalah lagi visi presiden presiden sudah ganti rasanya belum belum itu masalah lain. Tapi bila begini, kita tidak bisa mendapatkan gambaran untuk apa yang diinginkan oleh masyarakat. Tapi kita mengetahui apa yang diinginkan oleh presiden. Kalau bahasanya dengan Bappenas. Tapi kalau melibatkan pihaknya lebih luas, kita bisa melibatkan pelaku UMKM atau kita bisa melibatkan pelaku industri dan penyusunan RENSTRA dan kita bisa melibatkan masyarakat, LSM dan lain sebagainya. Mungkin kita akan mendapatkan perspektif yang lebih baik dalam masyarakat. Jangan-jangan UMKM itu inginnya adalah proses registrasinya dipermudah karena menghilangkan syarat-syarat tertentu. Mungkin seperti itu mas didi jadi proses implementasi sudah baik, tetapi saran dari kami ini kalau bisa dilakukan feedback untuk mengubah Renstra lebih baik lagi dan rasa kedepan bisa melibatkan stakeholders dalam lingkup lebih luas akan lebih baik.

Transkrip Wawancara Narasumber 6
Redesain Sistem Perencanaan dan Penganggaran Untuk Penguatan Penganggaran
Berbasis Kinerja di BPOM

Nama : Wahyu Syafrico, S.E (WS)
Jabatan : Perencana Muda Biro Perencanaan dan Keuangan
Hari, tanggal : Rabu, 27 September 2023
Lokasi : Ruang Staf Biro Perencanaan dan Keuangan BPOM

A. Pertanyaan aspek Redesain Sistem Perencanaan dan Penganggaran

1. Bagaimana proses perumusan nomenklatur program, Kegiatan, Output dan Outcome dalam penerapan RSPP di Badan POM sudah optimal? Dan apakah ada pengaruhnya terhadap capaian NPSS BPOM?

*Pengaruh pasti ada cuma besar kecilnya itu yang sebenarnya tidak begitu berpengaruh terhadap penurunan NPSS. Kenapa hal itu terjadi, **karena indikator di BPOM itu udah sifatnya outcome, sudah tidak langsung dipengaruhi oleh output-output dibawahnya (WS-2)**. Apalagi untuk indikator yang membuat nilai NPSS turun seperti contohnya yang sangat besar pengaruhnya itu di indikator keberhasilan persentase perkara yang dinyatakan bersalah oleh pengadilan. Nah itu kan sangat di luar kendali BPOM, karena indikator itu merupakan hasil koordinasi dengan kejaksaan. Rentang kendalinya sangat jauh dari intervensi BPOM. Tapi kalau dikaitkan dengan RSPP mungkin sedikitnya ada pengaruh juga karena memang output-ouput yang apa kegiatan yang mendukung tingkat tersebut, tidak langsung mempengaruhi capaian ini. **Kalau berdasarkan evaluasi bahwa di RSPP BPOM memang penyusunannya masih bersifat teknis level di input ya belum dia belum bisa mengarah ke level yang langsung mempengaruhi dari indikator kinerjanya.***

2. Bagaimana proses sinkronisasi penyusunan RENJA dan RKAKL dalam perencanaan dan penganggaran tahunan ? Apakah berdampak terhadap proses evaluasi kinerja? Apa dasar menentukan hubungan RO dengan

sasaran strategis pada dokumen lakip, karena pada dokumen perencanaan dan penganggaran tidak terdapat hubungan langsung RO dengan sasaran strategis

Memang dalam penyusunan Lakip itu dasarnya adalah Renstra dan Perjanjian Kinerja (PK), memang di renstra hubungan langsung antara RO dengan sasaran strategis itu tidak ada, adanya di PK, nah memang dasar penyusunan PK ini berdasarkan kesepakatan dan identifikasi bersama dengan unit teknis. Padahal seharusnya memang semuanya berasal dari renstra, agar ada kesinkronan dari semua dokumen perencanaan dan penganggaran yang ada (WS-3). Hal ini terjadi karena sasaran strategis di renstra memang sifatnya outcome sehingga tidak tergambar langsung anggarannya. Renstra disusun untuk periode jangka menengah 5 tahunan, sedangkan RO disusun tahunan, sehingga terlihat belum selaras karena hasil evaluasi RO-RO tercapai semua, namun sasaran strategis belum tercapai.

B. Pertanyaan aspek Indikator Kinerja

1. Bagaimana penerapan *logic model* dalam penyusunan informasi kinerja sesuai RSPP di BPOM?

Logframe itu kan dianut oleh Kemenpan dan Bappenas, sedangkan BPOM menganut Balance Scorecard (BSC). Level-level di BSC level program jadi tidak kelihatan di dukung oleh indikator-indikator kegiatan yg mana saja yang mendukungnya. Jadi memang BPOM belum menerapkan logic model dalam penyusunan informasi kinerjanya (WS-1), namun dalam evaluasi kinerja sudah menggunakan logic model karena tuntutan dari mitra kerja BPOM seperti Bappenas dan kemenpan RB dalam rangka evaluasi kinerja. penggunaan logic model juga bisa membantu menseleksi sasaran-sasaran strategis yang akan dicantumkan pada level-level perspektif di BSC.

C. Pertanyaan aspek Penganggaran Berbasis Kinerja

1. Sejauh mana kaitan restruktur organisasi terhadap pencapaian kinerja di BPOM?

Ada pasti ya ada kaitannya, apa lagi kita ada penambahan satker baru.

satker baru ini juga dibebankan pencapaian kinerjanya, Nah ini berarti jadi perhitungan untuk mengkalkulasikan indikator capaian kerja. Nah, sebagaimana kita tahu, Satker baru ini kan butuh bimbingan butuh pembinaan. Nah sementara sudah langsung, udah langsung dibebankan untuk bisa mencapai target-target yang ditentukan. Nah, itu pasti akan sangat mempengaruhi capaian kinerja secara total. Penurunan kinerja ini juga disebabkan karena tadi kompetensi dari petugas satkernya nya sendiri belum dapat ditingkatkan karena mereka baru paham segala macam tapi sudah langsung diberikan beban tugas untuk mencapai sasaran strategis tadi.

2. Sejauh mana penyusunan dokumen RKA-K/L telah mengacu pada sasaran dan target kinerja pada dokumen RKP, Renstra maupun Renja K/L, dan evaluasi kinerja? karena pada data ditemukan adanya data anomali GAP, apakah ada evaluasi untuk menyesuaikan target kinerja?

*Anomali GAP terjadi karena pada saat dievaluasi itu ternyata memang targetnya sudah tercapai? Jadi walaupun ikutan anggarannya, mereka enggak mungkin lagi untuk menyesuainya. Anomali ada 2 perhitungan ini kita mengacu ke aturan yang dikeluarkan oleh DJA. Itu kan capaian kalau di atas 200%. Namun untuk perhitungan nilai evaluasi kinerjanya itu aplikasi sudah langsung otomatis menghitung di angka 120. Nah untuk unit yang sudah terindikasi. Lebih dari targetnya **biasanya kami saat evaluasi menyarankan untuk mengusulkan perubahan target agar disesuaikan dengan batas maksimal untuk penilaian efisiensinya. Karena kalau kita pertimbangannya capaian, capaian yang berlebih itu juga mempengaruhi nanti efisiensi. Jadi kalau kita pastikan dengan targetnya seperti itu juga tidak tidak mendapatkan nilai tambah untuk komponen efisiensi seperti itu.** Nah, satu lagi nilai kembali untuk indikator-indikator dalam penilaian biasanya kita gunakan. Ketentuan ini ini untuk indikator indikator yang. Capaiannya di atas 120%. Nah ini kalau ini kita sesuai. Pada masa kini kita di atas ratus 20% itu indikator sudah tidak lagi disimpulkan.*

Transkrip Wawancara Narasumber 7
Redesain Sistem Perencanaan dan Penganggaran Untuk Penguatan Penganggaran
Berbasis Kinerja di BPOM

Nama : Muzenah, S.Farm, Apt (M)
Jabatan : Analis Kebijakan Muda Biro Perencanaan dan Keuangan
Hari, tanggal : 27 Oktober 2023
Lokasi : Jakarta

A. Pertanyaan aspek Redesain Sistem Perencanaan dan Penganggaran

1. Bagaimana proses perumusan nomenklatur program, Kegiatan, Output dan Outcome dalam penerapan RSPP di Badan POM?

*Nah kalau untuk perumusan nomenklatur, kita berangkat dari renstra dulu ya. Dokumen renstra awal 2020, Itu rumusan program dan kegiatan itu masih belum sesuai RSPP ya, karena RSPP baru ada di tahun 2021? Jadi program itu masih eselon 1, karena kepala BPOM merupakan eselon 1, makanya hanya punya 1 program. Dan kegiatan itu ketika penyusunan renstra dulu merupakan setingkat eselon 2. Kita tuh merumuskan sasaran-sasaran strategis itu outcome. Sedangkan untuk outputnya dalam penyusunan renstra itu, kita hanya ketika itu hanya berfokus pada output-output yang bersifat prioritas nasional. Nanti di penyusunan renja di tahunannya itu baru diidentifikasi output-output yang secara lebih rinci untuk masing masing kegiatan sesuai panduannya. Sesuai dengan RSPP itu dalam penyusunan renja. Untuk diidentifikasi KRO dan RO dari masing masing kegiatan gitu. **Perumusan program dan kegiatan juga telah memperhatikan juga perumusan informasi kinerja dalam penyusunan data tersebut karena penyusunan itu kan mengacu pada permen ppn dari bapenas. Pada pedoman penyusunan itu di situ memang mengatur kalau program untuk non Kementerian lembaga itu memang cuma ada satu. Program teknis dan satu program dukungan gitu (M-1). Tapi memang untuk kegiatan, karena dulu memang kegiatan itu di level eselon 2, jadi***

kita menyesuaikan kegiatan dengan tugas fungsi utama dari masing-masing eselon 2. Sehingga perumusan nomenklatur kegiatan dan informasi kinerja di dalam sasaran kegiatan itu mencerminkan tugas dan fungsi dari eselon 2 bukan bagaimana pencapaian dari kegiatan itu terhadap program (M-2).

2. Bagaimana proses sinkronisasi penyusunan RENJA dan RKAKL dalam perencanaan dan penganggaran tahunan?

Dengan adanya RSPP ini sebenarnya anggapan tersebut sudah bisa di selesaikan. Antara Renstra, Renja dan RKA-K/L sekarang sudah bisa selaras. Hal ini karena informasi kinerja yang terdapat pada aplikasi krisna renstra langsung otomatis menjadi informasi kinerja pada aplikasi krisna renja. Informasi kinerja pada tahap perencanaan ini dengan sinkronisasi sistem pada aplikasi Sakti saat ini sudah langsung otomatis menjadi informasi kinerja untuk dokumen penganggaran. Ketidak sinkronan memang belum bisa dimplementasikan pada dokumen renstra yang sudah ditetapkan. Karena renstra ditetapkan sebelum renja disahkan (M-6), dan BPOM tidak di perbolehkan untuk melakukan revisi renstra pada Tahun 2021, kita hanya di izinkan melakukan reuiu dokumen.

B. Pertanyaan aspek Indikator Kinerja

1. Bagaimana proses perumusan informasi kinerja dalam penyusunan renstra dan Renja?

*Dalam penyusunan informasi kinerja ini kan luas ya, salah satunya itu kan kexasaran strategis gitu kan indikatornya apa sasaran program. Itu kan maksudnya sasaran program sasaran kegiatan. Nah, ketika kita melakukan penyusunan informasi kinerja itu, kita menggunakan pendekatan BSC. Nah di situ kita merumuskan sasaran strategis indikatornya apa gitu kan. Nah di situ nanti kita cascading dari sasaran strategis itu kita mau cascading ke level sasaran dan sasaran kegiatan. **Dulu awalnya kita dalam merumuskan BSC memang sempat merumuskan 4 perspektif gitu di mana ada perspektif customer dan ada perspektif stakeholder nya. Cuma setelah kita***

challenge kalau untuk di level BPOM mungkin kita bisa. Nih customer sama stakeholder. Tapi begitu kita melakukan cascading sampai ke level kegiatan itu akan sulit untuk membedakan antara stakeholder dan customer gitu. Karena antara perspective customer sama stakeholder BPOM itu seringkali ada irisan-irisan gitu. Sehingga kita akhirnya menggunakan tiga perspective saja (M-3). Dalam ketidak adaannya perspektif konsumen, untuk output program sendiri. Kita itu merumuskan kayak apa ya output-output utama, output output besar yang jadi tugas tugas utama BPOM yang bersifat apa yang bersifat agregat gitu. Jadi tuh kita merumuskan output baru gitu sih buat si output program ini (M-4).

2. Bagaimana penerapan indikator kinerja di BPOM?

Nah sebenarnya sih kalau untuk indikator kinerja Sasaran yang ada saat ini. kita menggunakan BSC itu sebenarnya sangat baik ya jadi kayak semua kinerja dari setiap level dari setiap perspektif itu bisa dipantau supaya lebih keliatan gitu lebih bergambar supaya tercapainya. Tapi memang dengan BSC, indikator itu terlalu banyak, dengan pendekatan bsc ini rentan sama adanya sasaran strategis yang levelnya itu di internal proses ataupun di lower ground, akan ada Indikator sasaran kegiatan yang enggak oke banget gitu (M-7). Itu yang sering kali jadi kendala ketika kita melakukan evaluasi baik oleh kemenpan maupun pihak external lain.

C. Pertanyaan aspek Penganggaran Berbasis Kinerja

1. Sejauh mana penerapan Penganggaran Berbasis Kinerja di BPOM?

Kalau saat ini sih kita, ya sudah sudah mulai mengarah ke perbaikan tapi sebenarnya belum sempurna- sempurna banget. Kayak misalnya di Renstra, sekarang tetap di dalam kerangka pendanaan sendiri. Itu kita belum memetakan sampai ke level RO. Anggaran per indikator sasaran gitu misalnya gitu belum belum ada (m-6). Itu yang ke depan bisa lebih diperdalam. Kalau untuk di kita ada dokumen tahunan perjanjian kinerja ya. Tapi itu mungkin nanti ke depan mesti diperbaiki lagi sih, biar supaya lebih seragam dan lebih runut dari level renstranya.

Transkrip Wawancara Narasumber 8
Redesain Sistem Perencanaan dan Penganggaran Untuk Penguatan Penganggaran
Berbasis Kinerja di BPOM

Nama : Ikhsanudin Muchlis, S.Sos (IM)
Jabatan : Analis Kebijakan Pertama
Hari, tanggal : 27 September 2023
Lokasi : Jakarta

A. Pertanyaan aspek Redesain Sistem Perencanaan dan Penganggaran

1. Bagaimana proses perumusan nomenklatur program, Kegiatan, Output dan Outcome dalam penerapan RSPP di Badan POM?

*Sejak penerapan RSPP, BPOM terus melakukan perbaikan pada struktur informasi kinerja dalam Renja salah satunya **pada penyusunan RO agar sesuai dengan karakteristiknya yaitu berupa barang dan jasa yang menggambarkan fokus/lokus tertentu dan bersifat spesifik sehingga mencerminkan tugas dan fungsi unit kerja yang menghasilkan RO tersebut (IM-1)**. Namun demikian perumusan RO pada beberapa kegiatan di BPOM dinilai belum menggambarkan output riil yang mendukung pencapaian sasaran kegiatan unit kerja pelaksana secara langsung karena tidak seluruh RO memiliki hubungan logis dalam mendukung langsung sasaran kegiatan. Pada tahun 2022 adalah tahun kedua penerapan RSPP pada Renja BPOM, dan penyusunan informasi kinerja sudah lebih baik dibanding tahun sebelumnya salah satunya dengan diterapkannya RO dan KRO generik oleh Bappenas dan Kementerian Keuangan. Adapun penggunaan RO dan KRO-yang bersifat dukungan manajemen pada program teknis dikarenakan tahap finalisasi informasi kinerja dilakukan setelah adanya persetujuan pagu antar program dengan Komisi IX DPR RI sehingga tidak dimungkinkan dilakukan penyesuaian informasi kinerja yang mengakibatkan pergeseran pagu antar program. Sehingga penggunaan RO dan KRO yang bersifat dukungan manajemen pada*

program teknis tetap dipertahankan atas dasar persetujuan Kementerian Keuangan dan Bappenas (IM-4). Sedangkan definisi dari KRO pada saat sebelum disahkan Komisi IX DPR belum ada, sehingga saat penyusunan mengikuti pagu yang diberikan oleh kemenkeu dan bappenas (IM-2).

B. Pertanyaan aspek Indikator Kinerja

1. Bagaimana proses perumusan informasi kinerja dalam penyusunan renstra dan Renja?

Sasaran Strategis, Sasaran Program, dan Sasaran Kegiatan BPOM telah ditetapkan melalui Renstra BPOM 2020-2024 yang kemudian diacu pada dokumen Renja sebagai turunannya. secara teknis proses penandaan dukungan sasaran kegiatan terhadap sasaran program dilakukan pada aplikasi Krisna renja dimana terdapat ketentuan satu sasaran kegiatan hanya dapat mendukung satu sasaran program. Begitu juga pada level dibawahnya yaitu satu RO hanya dapat mendukung satu sasaran kegiatan. Hal ini menyebabkan banyak sasaran kegiatan yang tidak memiliki dukungan anggaran dikarenakan jumlah sasaran kegiatan yang lebih banyak daripada jumlah RO (IM-3). Pencapaian sasaran sebuah indikator perlu disertai target yang ditetapkan secara realistis dimana pencapaiannya benar-benar bisa dilakukan sehingga dalam menentukan komponen pembentuk indikator tersebut juga perlu mempertimbangkan seluruh kegiatan yang terkait dan relevan. Selain itu indikator harus mampu diukur dengan jelas dan jelas cara pengukurannya sehingga sejauh komponen pembentuk masih relevan dan dapat dihitung serta bukan menjadi satu satunya penentu keberhasilan pencapaian sasaran indikator maka dinilai masih tepat untuk digunakan. Sedangkan informasi kinerja terkait prioritas Nasional bukan dari BPOM. tagging PN dan Non PN itu kewenangan Bappenas, BPOM tidak bisa menolak apabila Bappenas sudah berpendapat bahwa kalau RO itu PN, sedangkan BPOM sendiri kalau memungkinkan tidak mengusulkan RO PN karena susah pada saat pelaksanaannya” (IM-5)

Transkrip Wawancara Narasumber 9
Redesain Sistem Perencanaan dan Penganggaran Untuk Penguatan Penganggaran
Berbasis Kinerja di BPOM

Nama : Mia Riska, S.Si (MR)
Jabatan : Perencana Pertama Satker PPPOMN
Hari, tanggal : 4 Oktober 2023
Lokasi : Jakarta

Pertanyaan Aspek Evaluasi Kinerja

1. Kriteria Kepemimpinan

Bagaimana upaya pemimpin dalam proses pencapaian kinerja, mulai dari proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan evaluasi kinerja?

Keterlibatan pimpinan itu sangat penting mas. Di sini dari dalam penyusunan renstra itu, pimpinan juga sudah terlibat terutama kebijakan-kebijakan apa sih yang harus diambil yang mendukung visi misi. Jadi dari situ kita turunkan lagi dalam pencapaian kegiatan-kegiatan strategis. Apa yang harus dibuat dalam penyusunan Perencanaan dan penganggaran seperti itu. Mungkin dari situ kemudian dikembangkan kembali kegiatan mana yang mendukung visi misinya, kegiatan mana yang mendukung jadi tugas fungsinya PPPOMN, seperti itu. Dalam pencapaian kinerja pimpinan juga sudah terlibat langsung seperti misalnya memberikan arahan yang jelas, terus memberikan kemudahan kerja kepada pegawainya. di Pusat pengembangan pengujian kita melakukan monev monitoring evaluasi setiap satu bulan sekali, itu sebelum di awal bulan berikutnya dengan pimpinan terlibat langsung mengevaluasi capaian-capaian mana yang kurang atau capaian-capaian mana yang harus dioptimalkan dalam pencapaiannya mungkin di setiap triwulan. Sehingga di setiap bulannya kita dapat evaluasi. Ke mana aja sih gitu kan apa upaya kita untuk meningkatkan dari target itu mana yang kurang dan pimpinan selalu terlibat dan kemudian memberikan arahan apa yang harus dilakukan selanjutnya

2. Kriteria Kebijakan dan Strategi

Sejauh mana kebijakan dan strategi yang dibuat telah berdasarkan evaluasi kinerja, kebutuhan stakeholder dan bagaimana implementasinya?

Iya kebijakan strategis itu didukung juga oleh sumber daya ya mas ya, sumber daya anggaran juga kadang yang masih belum optimal. Kebijakan-kebijakan oleh pimpinan selalu dievaluasi jika tidak tercapai kebijakan itu, kita akan membuat kebijakan yang baru tapi tetap mendukung visi misi Badan POM. Kebijakan yang dibuat juga telah sesuai kebutuhan dari stakeholder.

3. Kriteria Sumber Daya Manusia

Bagaimana peranan SDM dalam pencapaian Kinerja organisasi?

Oke. Semua SDM itu terlibat aktif saya rasa, karena masing-masing kan punya fungsinya tersendiri. Untuk pemenuhan sumber dayanya kita mempunyai analisis kebutuhan sumber daya, itu sudah sudah juga dihitung kebutuhannya dan untuk mencapai ideal gitu. Itu semua sudah. Cuma secara kebutuhan itu masih belum optimal. Ya kira kira.

4. Kriteria Manajemen Sumber Daya dan Kemitraan

Bagaimana pengelolaan sumberdaya dan kemitraan dalam pencapaian kinerja organisasi?

Karena sebagai induk pusat pengujian di BPOM, PPPOM memiliki output jejaring laboratorium yang merupakan output pengelolaan kemitraan di PPPOMN. Sedangkan pengelolaan sarana prasarana di PPPOMN sudah sesuai aturan pengelolaan BMN. Untuk peralatan penerapan teknologi itu kan selalu berkembang ya. Apalagi sebagai Pusat pengujian, penggunaan alat laboratorium yang canggih dan teknologi terbaru haruslah terpenuhi. Hal ini agar pengujian-pengujian di Laboratorium-laboratorium di UPT bisa optimal.

5. Kriteria Proses

Sejauh mana proses dalam pencapaian kinerja telah dilakukan secara sistematis dan mengembangkan inovasi dalam pencapaiannya?

Dalam melayani pelanggan PPPOMN telah memiliki aplikasi Infalabs.

Inovasi ini dilakukan dalam rangka memenuhi kebutuhan pelanggan dan stakeholder. Pelanggan bisa memantau proses pengujian yang dilakukan, sampai nanti hasil diserahkan ke pelanggan. Dalam merancang output seperti jasa kalibrasi alat laboratorium, outputnya alat yang selesai dikalibrasi, ini merupakan bukti layanan dilakukan sampai selesai dan diserahkan kepada pelanggan.

6. Kriteria Kepuasan Pelanggan

Sejauh mana pengukuran persepsi pelanggan terhadap pelayanan yang diberikan?

Kepuasan pelanggan telah dilakukan, untuk indeks kepuasan pelanggan PPOMN pada tahun 2022 melebihi target yang ditetapkan, indeks kepuasan pelanggan PPPOMN dicerminkan dalam indeks pelayanan publik sebesar 4,77 dari target 4,30.

7. Kriteria Kepuasan Pegawai

Sejauh mana pengukuran persepsi pegawai terhadap pelayanan yang diberikan?

Untuk pengukuran persepsi pegawai terhadap pelayanan yang diberikan, dan layanan yang mereka berikan belum dilakukan. Yang dilakukan hanya pengukuran kepuasan atas pelayanan Tata Usaha.

8. Kriteria Hasil Sosial Masyarakat

Sejauh mana pengukuran persepsi masyarakat terhadap kinerja satker?

Indeks pengukuran persepsi masyarakat dilakukan baru terhadap masyarakat yang menerima pelayanan publik dari PPPOMN, capaian pada tahun 2022 adalah sebesar 92,64 dari target 91.

9. Kriteria Hasil Kinerja

Bagaimana hasil pengukuran kinerja satker bapak/ibu?

Pengukuran kinerja dilakukan dengan model BSC sesuai yang tercantum di dalam rencana, dan di cantumkan ke dalam dokumen LAKIP PPPOMN. Untuk pengukuran kinerja terhadap outcome memang belum dilakukan.

Transkrip Wawancara Narasumber 10
Redesain Sistem Perencanaan dan Penganggaran Untuk Penguatan Penganggaran
Berbasis Kinerja di BPOM

Nama : Arby Shahab, S.Si (AS)
Jabatan : Pengawas Farmasi Makanan Pertama Satker LOKA POM BIMA
Hari, tanggal : 4 Oktober 2023
Lokasi : Jakarta

Pertanyaan Aspek Evaluasi Kinerja

1. Kriteria Kepemimpinan

Bagaimana upaya pemimpin dalam proses pencapaian kinerja, mulai dari proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan evaluasi kinerja?

Dari pimpinan selalu apa namanya menekankan bahwa visi dan misi seperti apa sehingga menjadikan target ditetapkan. Kita selalu dilakukan evaluasi-evaluasi target itu apakah sudah berjalan sesuai. Sesuai dengan apa namanya, sesuai dengan rencana yang kita buat atau ada hal-hal yang misalnya yang menghambat atau berpotensi untuk menghambat. Jadi. Setiap bulannya kita selalu mengantisipasi melakukan evaluasi dan antisipasi terkait dengan target yang mungkin tidak tercapai, sehingga problemnya itu sudah kita ketahui dulu. Evaluasi sekaligus untuk antisipasi untuk perubahannya. Bahkan karena di Badan POM yang pergerakan atau prosesnya kan apalagi menyangkut dengan masyarakat itu sangat sangat-sangat fleksibel. Jadinya situasinya bisa sangat sangat berubah cepat jadinya. Sehingga kegiatan dan strategi disesuaikan dengan perubahannya. Kalau pimpinan terhadap budaya kerja. Pada supaya betah memberikan semacam motivasi atau memberikan semacam contoh segala macam dalam bentuk budaya kerja pimpinan selalu menunjukkan contoh bahwa dia langsung melakukan apa yang maksudnya apa yang harus diikuti oleh pegawainya. Jadi dia melakukan dulu apa yang. Apa yang harusnya dilakukan oleh seorang pegawai jadinya dia mencontohkan langsung, misalnya dengan sikap

integritasnya, misalnya integritas terhadap apa namanya terhadap pelaku usaha, misalnya dalam rangka melayani pelaku usaha, jadinya dia langsung mencontohkan. Kalau interaksi sama pelaku usaha, pemda kalau dengan yang di pemda apa kita sudah membina sudah membuat mou dengan berbagai lintas sektor; misalnya dengan kepolisian, dengan kejaksaan, dengan Dinas Kesehatan, dinas ketahanan pangan sama dinas kelautan dan perikanan Intinya semua semua lintas sektor yang berkaitan dengan pengawasan obat dan makanan sudah diikuti sertakan dalam proses kegiatan, sehingga pencapaian targetnya lebih akan lebih apa lebih. Lebih lebih efisien dan efektif seperti itu.

2. Kriteria Kebijakan dan Strategi

Sejauh mana kebijakan dan strategi yang dibuat telah berdasarkan evaluasi kinerja, kebutuhan stakeholder dan bagaimana implementasinya?

Untuk kebijakan dan strategi secara umum kita mengikuti roadmap dari pusat. Kita juga punya apa namanya kebijakan dan strategi sendiri misalnya kita dalam proses pencapaian target kinerja misalnya. Misalnya untuk menyambut tahun ini, kita sudah apa namanya persiapan untuk pengujian. Misalnya kebutuhan terkait terkait pengujian termasuk internal dan eksternal, misalnya terkait kemudian pihak ketiga dari kepolisian karena tingkat kejahatan di kota tingkat kejahatan di lokasi kerjanya lumayan tinggi. Karena emang dari daerahnya emang ya mungkin seperti itu. Jadinya tingkat tingkat untuk kerja sama dengan misalnya pengujian untuk pihak ketiga itu sangat tinggi dan sangat tinggi, sehingga kita mengantisipasi untuk proses ke depan itu untuk membuat proses untuk pengujian pihak ketiga. Di lain dari pengujian rutin untuk yang pengembangan. Kebijakan atau strategi tadi selalu direview dan dikaji untuk diperbarui, kebijakan dan strategi selalu rutin dikaji dan untuk diperbarui misalnya tergantung dari melihat situasi-situasi yang ada. Saat ditanya proses tahun ini itu berjalan seperti apa, sehingga kita ke depannya misalnya. Melihat itu apa strategi kebijakan itu masih sesuai enggak dengan dengan kondisi yang akan datang, misalnya. Misalnya seperti tahun ini, seperti tahun-tahun sebelumnya itu

kita biasanya ke turun ke apa namanya masyarakat ke bagian kecamatan atau bagian masyarakat, masyarakat desa kita. Lokasi itu masih ada. Mereka desa itu cenderung untuk tidak apa namanya tidak berkelanjutan untuk apa namanya? Penyampaian informasi tersebut sehingga kita melakukan evaluasi ke depannya itu kita mengambil orang-orang atau agen bagian dari masyarakat atau pelaku usaha dan bagian-bagian dari pendidikan yang bisa me menyampaikan kembali apa yang kita sampaikan kepada mereka. Misalnya penyuluhan yang bisa disampaikan lagi kepada orang lain, sehingga. Penyuluhan itu bisa berkelanjutan ke depannya seperti itu. Strategi kebijakan pun sudah sudah dalam bentuk SOP, seperti pemeriksaan kita penyuluhan SOP apa namanya dari penindakan semuanya sudah terangkum ada di sop nya. Kemudian kita jalankan sesuai sop tersebut.

3. Kriteria Sumber Daya Manusia

Bagaimana peranan SDM dalam pencapaian Kinerja organisasi?

SDM di Loka seluruhnya itu terlibat aktif dalam pencapaian kinerja. Semua target kinerja untuk pengembangan kompetensi untuk pegawainya. Kita selalu ikut apa namanya pelatihan, pelatihan-pelatihan pertanian baik teknis maupun berbasis umum atau anggaran dan lain sebagainya. Karena memang pegawainya cuma sedikit. Jadinya rata rata pegawai sudah ternyata sudah terpapar semua terkait pelatihan baik yang teknis maupun yang administrasi, sehingga untuk pengembangannya akan lebih mudah karena pegawai sudah bisa malah merangkum semua semua pekerjaan yang ada di meja kerja. Artinya semua karena struktur organisasi dari kepala turun langsung ke fungsional. Jadinya apa namanya semua pekerjaan atau semua semua target yang berkaitan dengan target loka akan akan langsung menyangkut ke seluruh pegawai karena memang langsung ke bagian pegawai itu sendiri. Berarti semua pegawai sudah terlibat terlibat aktif ya. Kalau bentuk komunikasi antara pegawai dengan pimpinan terbuka. Misalnya proses pemeriksaan proses pengawasan sarana misalnya. Dalam proses pencapaian target misalnya, ada kendala atau ada sana yang mengalami

apa itu tutup atau dan lain sebagainya. Petugas atau pengawas lalu berkomunikasi langsung dengan pimpinan menyampaikan langsung, sehingga sehingga ada arahan atau ada cara penanggulangan yang diberikan oleh pimpinan sehingga. Dengan permasalahan itu bisa selesai jadi bentuk komunikasinya langsung langsung. Sedangkan untuk reward dan punishment apabila kinerja tidak tercapai belum ada, baru hanya ada semacam teguran atau semacam teguran secara lisan untuk bisa mencapai target tersebut.

4. Kriteria Manajemen Sumber Daya dan Kemitraan

Bagaimana pengelolaan sumberdaya dan kemitraan dalam pencapaian kinerja organisasi?

Kalau kemitraan misalnya sdah berjalan dengan aman. MOU nya sudah berjalan dengan baik dan lintas sektor itu, seperti gimana ya sangat-sangat mengandalkan BPOM, misalnya terjadi apapun terkait pengawasan obat dan makanan baik itu untuk cakupannya loka bima ataupun misalnya di luar dari loka Bima tetap melakukan konsultasi atau melakukan pelaporan kepada kami. Kemudian untuk yang terkait sarana prasarana lumayan terpenuhi sedikit demi sedikit karena satker juga masih baru. Jadinya secara perlahan sarananya bisa sedikit demi sedikit di penuhi. Kemudian untuk pemakaian sistem informasi, sistem informasi di sana sudah berbasis teknologi. Semuanya berbasis teknologi. Teknologi baik dari sistem penganggaran teknis maupun administrasi sudah memakai sistem teknologi. Ada aplikasi-aplikasi baik aplikasi penganggaran maupun aplikasi yang digunakan untuk pembuatan surat, tugas dan lain sebagainya. Pengelolaan keuangan di sana kita sudah buat bahwa semua sesuai aturan yang ada harus kita ikuti. Jadinya kesepakatan itu sudah kita buat di awal, sehingga semua petugas itu semua pegawai mengikuti aturan-aturan dalam proses perbendaharaan atau proses keuangan. Jadinya semua proses keuangan berjalan sesuai dengan aturan yang ada. Jadinya semuanya jadinya berjalan lebih baik

5. Kriteria Proses

Sejauh mana proses dalam pencapaian kinerja telah dilakukan secara sistematis dan mengembangkan inovasi dalam pencapaiannya?

Kalau untuk pencapaian dari kinerja kita sudah berjalan secara sinergis karena kita secara rutin selalu apa namanya melakukan monev misalnya untuk pencapaian kinerja atau targetnya jadinya kita selalu melakukan evaluasi, dan perbaikan terkait apa yang harus diperbaiki, misalnya dari kinerja maupun dari sistem anggarannya telah menggunakan inovasi-inovasi, misalnya terkait dari pembuatan surat, surat tugas maupun sampai sampai penganggaran kita. Selain dari aplikasi dari Kemenkeu, kita punya juga aplikasi sendiri untuk membekap misalnya. Kalau untuk layanan kita ke masyarakat langsung sekitar langsung mendapatkan layanan tersebut, Penyampaian informasi pemberian informasi dan. Dan kemudian yang bermasalah dan pengaduan. Misalnya masyarakat sudah dibuka secara terbuka secara maupun secara langsung, datang ke kantor maupun secara online dan secara secara namanya. Secara online maupun by phone pun kita sudah menyiapkan. Misalnya pelanggan tidak mempunyai pulsa, bisa kita telepon kembali kepada pelanggan sehingga apa yang disampaikan oleh pelanggan, misalnya pelaporan ataupun permintaan informasi mudah didapatkan dengan baik sehingga. Apa semua keluhan dan semua permintaan dari pelanggan selalu ditindaklanjuti dengan cepat oleh. Baik yang itu yang bisa langsung ditindaklanjuti ke lapangan ataupun cuma untuk ditanggapi secara informasi atau cukup dengan kalimat saja. Sehingga pimpinan dalam mengelola hubungan dengan pelanggan sangat aktif.

6. Kriteria Kepuasan Pelanggan

Sejauh mana pengukuran persepsi pelanggan terhadap pelayanan yang diberikan?

Persepsi pelanggan terhadap pelayanan sudah kita lakukan pengukuran Dengan model angket sehingga pelanggan yang diberikan informasi atau dilakukan pelayanan langsung mengisi angket tersebut. Jadinya indeksnya dari yang mereka isi surveinya itu sudah kita lakukan. Penerapan indikator kinerja kepuasan pelanggan kira kira. Akan sangat puas dengan layanan

yang kita berikan karena kita menyampaikan layanan itu dengan cara yang dengan baik dan juara dengan dengan lengkap dan jelas. Misalnya kalau misalnya langganan pelayanan yang diminta misalnya. Terkait proses registrasi atau proses sertifikasi, kita melakukan pendampingan dari a sampai z semua pun kita dampingi maupun walaupun itu di luar dari wilayah LOKA POM.

7. Kriteria Kepuasan Pegawai

Sejauh mana pengukuran persepsi pegawai terhadap pelayanan yang diberikan?

Kalau kepuasan pegawai ini belum ada spesifik. Indeks pengukuran kepuasan pegawainya. Jadinya kita hanya melakukan sosialisasi mengenalkan apa namanya diskusi bersama misalnya menyampaikan apa-apa yang kekurangan atau apa yang mau disampaikan sehingga kita bisa berdiskusi bersama apakah ada masalah atau ada apa yang ingin disampaikan

8. Kriteria Hasil Sosial Masyarakat

Sejauh mana pengukuran persepsi masyarakat terhadap kinerja satker?

Pengukuran persepsi masyarakat belum dilakukan

9. Kriteria Hasil Kinerja

Bagaimana hasil pengukuran kinerja satker bapak/ibu?

Untuk pencapaian kinerja terhadap outcome, dilakukan pengukuran yang dituangkan dalam dokumen lakip, untuk outcome terhadap masyarakat sangat berdampak dengan adanya LOKA POM Bima.

Transkrip Wawancara Narasumber 11
Redesain Sistem Perencanaan dan Penganggaran Untuk Penguatan Penganggaran
Berbasis Kinerja di BPOM

Nama : Raden Satriya Pinandhita, SE (RS)
Jabatan : PPK Satker LOKA POM Banyumas
Hari, tanggal : 4 Oktober 2023
Lokasi : Jakarta

Pertanyaan Aspek Evaluasi Kinerja

1. Kriteria Kepemimpinan

Bagaimana upaya pemimpin dalam proses pencapaian kinerja, mulai dari proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan evaluasi kinerja?

Kepala UPT tidak mengembangkan visi misi UPT dari pengembangan visi misi organisasi pusat dengan melakukan analisis balance scorecard, namun pimpinan ikut dalam penyusunan rencana kegiatan yang dituangkan dalam rencana anggaran dan biaya 1 tahun kegiatan. Pimpinan juga terlibat langsung/bertemu dengan stakeholder terkait untuk koordinasi untuk pencapaian kinerja satker. Pimpinan juga memberikan contoh secara nyata implementasi budaya kerja organisasi salah satunya dengan melakukan koordinasi dengan staf secara terjadwal maupun insidental.

2. Kriteria Kebijakan dan Strategi

Sejauh mana kebijakan dan strategi yang dibuat telah berdasarkan evaluasi kinerja, kebutuhan stakeholder dan bagaimana implementasinya?

Kebijakan dibuat secara jangka pendek tahunan dan 5 tahunan berdasar kondisi lapangan dan masukan dari analisis stakeholder, informasi dari monev kinerja, peluang hambatan dari eksternal. Selain itu juga dilakukan monev secara periodik dan dilakukan tindak lanjut perbaikan. Kebijakan dan strategi dari renstra dan rencana kerja tahunan diturunkan kedalam rencana kerja individu yang dilakukan berdasarkan standar operational prosedur organisasi.

3. Kriteria Sumber Daya Manusia

Bagaimana peranan SDM dalam pencapaian Kinerja organisasi?

Kebutuhan SDM dianalisis melalui analisis beban kerja, dikelola berdasarkan hasil pemetaan kompetensi maupun teknis untuk pengembangan kompetensi agar sesuai standar untuk mampu menyelesaikan target kinerja. pelatihan-pelatihan dikembangkan dari GAP kompetensi teknis maupun manajerial melalui perencanaan pengembangan kompetensi secara organisasi maupun individu. Setiap individu mempunyai target kinerja yang dimonev secara periodik. Komunikasi dilakukan secara dua arah secara langsung maupun melalui monev periodik. Reward secara langsung melalui apresiasi pekerjaan dan punishment melalui mekanisme peraturan kepegawaian

4. Kriteria Manajemen Sumber Daya dan Kemitraan

Bagaimana pengelolaan sumberdaya dan kemitraan dalam pencapaian kinerja organisasi?

Pengelolaan sumberdaya dilakukan melalui perjanjian kinerja MOU dengan K/L atau Pemda terkait dalam bentuk kelompok kerja. Pengelolaan keuangan sangat memengaruhi pencapaian kinerja, sednagkan penganggaran mengikuti perencanaan kinerja/kegiatan. Untuk pengelolaan Sarpras direncanakan berdasarkan kebutuhan. TIK membantu efisiensi kerja. TIK berpengaruh meningkatkan pencapaian kinerja melalui kemudahan pencarian informasi dan efisiensi pekerjaan.

5. Kriteria Proses

Sejauh mana proses dalam pencapaian kinerja telah dilakukan secara sistematis dan mengembangkan inovasi dalam pencapaiannya?

Kinerja dikelola secara terprogram melalui bantuan TIK sehingga sistematis dalam perencanaan maupun monev. Monev kinerja ditindaklanjuti dengan melakukan perbaikan melalui inovasi dan dilakukan survei kepuasan pelanggan. Dilakukan melalui tindaklanjut hasil survei kepada pelanggan. Dimonotoring melalui timeline dan laporan progres penyelesaian. Dilakukan dengan pelayanan secara prima

6. Kriteria Kepuasan Pelanggan

Sejauh mana pengukuran persepsi pelanggan terhadap pelayanan yang diberikan?

Pengukuran persepsi pelanggan dilakukan melalui survei, melalui pengisian form tingkat kepuasan pelanggan dan melalui saluran pengaduan langsung.

7. Kriteria Kepuasan Pegawai

Sejauh mana pengukuran persepsi pegawai terhadap pelayanan yang diberikan?

Pengukuran persepsi pegawai dilakukan melalui survei pelayanan internal. Indikator berdasarkan hasil survei baik dengan beberapa masukan yang membangun.

8. Kriteria Hasil Sosial Masyarakat

Sejauh mana pengukuran persepsi masyarakat terhadap kinerja satker?

Diukur melalui survei kepuasan masyarakat. Indikator berdasarkan kepuasan pelayanan, Hasilnya masih perlu ada peningkatan pelayanan

9. Kriteria Hasil Kinerja

Bagaimana hasil pengukuran kinerja satker bapak/ibu?

Indikator kinerja telah diterapkan secara sistematis untuk mengukur kinerja individu maupun organisasi, untuk hasilnya terlihat outcome sudah tercapai.

Transkrip Wawancara Narasumber 12
Redesain Sistem Perencanaan dan Penganggaran Untuk Penguatan Penganggaran
Berbasis Kinerja di BPOM

Nama : Agung Wijayanto, S.Kom (AW)
Jabatan : Analis Sistem Informasi dan jaringan Satker BBPOM Semarang
Hari, tanggal : 4 Oktober 2023
Lokasi : Jakarta

Pertanyaan Aspek Evaluasi Kinerja

1. Kriteria Kepemimpinan

Bagaimana upaya pemimpin dalam proses pencapaian kinerja, mulai dari proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan evaluasi kinerja?

Kepala UPT telah mensosialisasikan Visi dan Misi Organisasi. Pimpinan cukup aktif dalam penyusunan rencana kegiatan dan mereview rencana anggaran dan biaya. Pimpinan terlibat aktif langsung/bertemu dengan stakeholder terkait untuk koordinasi dengan lintas sektor. Pimpinan telah memberikan contoh secara nyata implementasi budaya kerja organisasi di masing masing subansi untuk pencapaian kinerja. Dengan melakukan koordinasi dengan ketua tim atau staf secara terjadwal mingguan maupun bulanan.

2. Kriteria Kebijakan dan Strategi

Sejauh mana kebijakan dan strategi yang dibuat telah berdasarkan evaluasi kinerja, kebutuhan stakeholder dan bagaimana implementasinya?

Kebijakan dan strategi telah dibuat berdasarkan masukan dari stakeholder dan kondisi di lapangan, hasil dari monev kinerja. Dilakukan monev dan progresif secara periodik dan dilakukan tindak lanjut perbaikan dan improvement. Dari renstra dan rencana kerja tahunan diturunkan kedalam rencana kerja individu yang dilakukan berdasarkan standar operational prosedur organisasi

3. Kriteria Sumber Daya Manusia

Bagaimana peranan SDM dalam pencapaian Kinerja organisasi?

Kebutuhan SDM dianalisis melalui analisis beban kerja, dikelola berdasarkan hasil pemetaan kompetensi maupun teknis untuk pengembangan kompetensi agar sesuai standar untuk mampu menyelesaikan target kinerja. Setiap individu mempunyai target kinerja yang dimonev secara periodik dan menyampaikan realisasi tiap triwulannya. Komunikasi dilakukan secara dua arah secara langsung maupun melalui periodik. Reward secara langsung melalui apresiasi pekerjaan dan punishment melalui mekanisme peraturan kepegawaian.

4. Kriteria Manajemen Sumber Daya dan Kemitraan

Bagaimana pengelolaan sumberdaya dan kemitraan dalam pencapaian kinerja organisasi?

Pengelolaan kemitraan dilakukan melalui perjanjian kerjasama dan MOU dengan lintas sektor terkait dalam pencapaian kinerja bersama. Pengelolaan keuangan selaras penganggaran dengan perencanaan kinerja/kegiatan. Sarpras direncanakan berdasarkan kebutuhan, namun pemenuhannya disesuaikan dengan ketersediaan anggaran. TIK berpengaruh meningkatkan pencapaian kinerja melalui kemudahan pencarian informasi dan efisiensi pekerjaan

5. Kriteria Proses

Sejauh mana proses dalam pencapaian kinerja telah dilakukan secara sistematis dan mengembangkan inovasi dalam pencapaiannya?

Kinerja dikelola secara terprogram melalui bantuan TIK sehingga sistematis dalam perencanaan sampai monev. Monev kinerja ditindaklanjuti dengan melakukan perbaikan melalui inovasi baik dengan aplikasi maupun dengan pendekatan lainnya. Produk dan layanan dirancang dan dikembangkan melalui tindaklanjut hasil survei kepada pelanggan. Dimonitoring melalui timeline dan laporan progres penyelesaian. Dilakukan dengan pelayanan secara prima dan melakukan survey kepuasan pelanggan untuk meningkatkan kualitas pelayanan

6. Kriteria Kepuasan Pelanggan

Sejauh mana pengukuran persepsi pelanggan terhadap pelayanan yang diberikan?

Dilakukan melalui survei melalui pengisian form tingkat kepuasan pelanggan dan melalui saluran pengaduan langsung. Untuk hasil indeks kepuasan pelanggan sebesar 94,5 dari target 88,2.

7. Kriteria Kepuasan Pegawai

Sejauh mana pengukuran persepsi pegawai terhadap pelayanan yang diberikan?

Telah dilakukan pengukuran persepsi pegawai, namun terbatas pada pelayanan ke tata usahaan. Pengukuran persepsi pegawai terhadap organisasi belum dilakukan.

8. Kriteria Hasil Sosial Masyarakat

Sejauh mana pengukuran persepsi masyarakat terhadap kinerja satker?

Diukur melalui survei kepuasan masyarakat. Indikator berdasarkan kepuasan pelayanan, Hasilnya indeks kepuasan masyarakat terhadap kinerja sebesar 75,8 dari target 72,16

9. Kriteria Hasil Kinerja

Bagaimana hasil pengukuran kinerja satker bapak/ibu?

Pengukuran kinerja upt dilakukan dengan melihat indek kepuasan masyarkat terhadap pelayanan Publik UPT dengan nilai 94,18 dari target 91.

Transkrip Wawancara Narasumber 13
Redesain Sistem Perencanaan dan Penganggaran Untuk Penguatan Penganggaran
Berbasis Kinerja di BPOM

Nama : Fajar Tri Kuncoro, A.Md (FT)
Jabatan : PPK Satker LOKA POM Surakarta
Hari, tanggal : 4 Oktober 2023
Lokasi : Jakarta

Pertanyaan Aspek Evaluasi Kinerja

1. Kriteria Kepemimpinan

Bagaimana upaya pemimpin dalam proses pencapaian kinerja, mulai dari proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan evaluasi kinerja?

Kepala UPT belum menjelaskan visi misi UPT. Hal ini disebabkan karena seringnya pergantian kepala UPT secara cepat. Sehingga belum sempat mengembangkan visi dan misi untuk UPT. Pimpinan ikut dalam penyusunan rencana kegiatan yang dituangkan dalam rencana anggaran dan biaya 1 tahun kegiatan serta dilakukan rapat progresif bulanan untuk bahan perencanaan berikutnya. dalam mengimplemntasikan kegiatan pimpinan terlibat langsung/bertemu dengan stakeholder terkait untuk koordinasi, serta membahas target yang belum tercapai melalui rapat progresif. Namun dengan seringnya pergantian mengakibatkan kerjasama dengan stakeholder mesti di perbaharui kembali. Dalam menciptakan budaya kerja pimpinan memberikan contoh secara nyata implementasi budaya kerja organisasi. Selain itu pimpinan dalam mengantisipasi perubahan selalu kordinasi dengan staf secara terjadwal maupun insidental.

2. Kriteria Kebijakan dan Strategi

Sejauh mana kebijakan dan strategi yang dibuat telah berdasarkan evaluasi kinerja, kebutuhan stakeholder dan bagaimana implementasinya?

Kebijakan dan strategi selalu berubah-ubah karena ada pergantian pimpinan yang cukup sering, namun positifnya kebijakan selalu mengikuti

perubahan lingkungan strategis di loka. Masukan dari stakeholder dan hasil evaluasi kinerja menjadi acuan dalam pengambilan kebijakan. Walaupun ada masukan dari stakeholder, namun kebijakan dan strategi tetap mengacu kepada Renstra yang telah ditetapkan, pemimpin yang berganti tidak bisa merubah renstra yang telah ditetapkan. Selain itu juga di Loka sudah punya SOP yang jelas.

3. Kriteria Sumber Daya Manusia

Bagaimana peranan SDM dalam pencapaian Kinerja organisasi?

Kebutuhan SDM dianalisis melalui analisis beban kerja, dikelola berdasarkan hasil pemetaan kompetensi maupun teknis untuk pengembangan kompetensi agar sesuai standar untuk mampu menyelesaikan target kinerja. Setiap individu mempunyai target kinerja yang langsung menjadi perjanjian kinerja dalam bentuk SKP yang dimonev secara periodik. Penilaian SKP telah menjadi dasar dalam pemberian reward tunjangan kinerja. Komunikasi antara staf dan pimpinan juga berjalan bagus, komunikasi sudah dua arah.

4. Kriteria Manajemen Sumber Daya dan Kemitraan

Bagaimana pengelolaan sumberdaya dan kemitraan dalam pencapaian kinerja organisasi?

Walau pimpinan sering berganti namun kerjasama dengan stakeholder telah di tetapkan melalui MOU, sehingga pimpinan yang baru bisa langsung bekerjasama dengan lintas sektor di loka berdasarkan MOU yang sudah di tanda tangani bersama. Kebutuhan sarana parasana memang belum memadai, karena sampai saat ini untuk kantor loka masih status pinjam pakai dari Pemda Surakarta. Sehingga tidak bisa di kembangkan untuk memenuhi kebutuhan pencapaian kinerja. Apalagi tahun 2024 mendatang LOKA akan meningkat statusnya menjadi Balai POM, sehingga membutuhkan gedung laboratorium untuk menunjang kinerja pengujian. Untuk penggunaan TIK dan teknologi telah sesuai dengan roadmap dari pusat data dan informasi Badan POM.

5. Kriteria Proses

Sejauh mana proses dalam pencapaian kinerja telah dilakukan secara sistematis dan mengembangkan inovasi dalam pencapaiannya?

Kinerja dikelola secara sistematis melalui aplikasi Simetris yang sudah terintegrasi dengan aplikasi SKP dan SIPT. Dalam memenuhi kebutuhan stakeholder, penggunaan inovasi sangat di butuhkan. Pemenuhan didasarkan dari hasil survei kepada pelanggan untuk merancang sumber daya yang diperlukan (SDM, Anggaran, Sarpras). Untuk hasil kinerja selalu di selesaikan tepat waktu sesuai timeline melalui pelayanan prima dan disampaikan kepada pelanggan.

6. Kriteria Kepuasan Pelanggan

Sejauh mana pengukuran persepsi pelanggan terhadap pelayanan yang diberikan?

Penilaian Kepuasan pelanggan telah dilakukan melalui survei kepuasan pelanggan melalui form yang tersedia, dan juga melalui saluran pengaduan langsung.

7. Kriteria Kepuasan Pegawai

Sejauh mana pengukuran persepsi pegawai terhadap pelayanan yang diberikan?

Pengukuran survei kepuasan pegawai dilakukan melalui survei pelayanan internal.

8. Kriteria Hasil Sosial Masyarakat

Sejauh mana pengukuran persepsi masyarakat terhadap kinerja satker?

Diukur melalui survei kepuasan masyarakat.

9. Kriteria Hasil Kinerja

Bagaimana hasil pengukuran kinerja satker bapak/ibu?

Hasil pengukuran kinerja belum memuaskan, dengan nilai 99,09.

RIWAYAT HIDUP PENULIS

Nama Penulis	:	Didi Suryadi
Tempat dan Tanggal Lahir	:	Sawahlunto, 10 Mei 1985
Alamat Rumah dan Nomor Telepon Genggam	:	Jl. Percetakan negara gg tirta sari no 35 G RT 001 RW 003, kel. Rawasari, Kec Cempaka Putih, Jakarta Pusat (085263423623)
Email/Surel	:	didi_qbo@yahoo.co.id
Status Perkawinan	:	Menikah
Nama Instansi	:	Badan Pengawas Obat dan Makanan
Alamat Instansi dan Nomor Telepon	:	Jl. Percetakan Negara No 23, Kel Johar Baru, Kec. Johar Baru, Jakarta Pusat, DKI Jakarta 10570
Jabatan	:	Analisis Anggaran Ahli Muda
Pangkat dan Golongan	:	Penata III/C
Riwayat Pendidikan	:	<ol style="list-style-type: none">1. SDN 29 Muaro Sijunjung (1991-1997)2. SMPN 2 Sijunjung (1997-2000)3. SMUN 1 Sijunjung (2000-2003)4. Jurusan Manajemen, Fakultas Ekonomi Universitas Andalas (2003-2009)
Riwayat Pekerjaan	:	Biro Perencanaan dan Keuangan (2010-Sekarang)

Nomor : 2101/STIA.1.1/PPS.02.3
Sifat : Biasa
Lampiran : Proposal Tesis
Hal : Permohonan Ijin Penelitian Mahasiswa Program Magister Terapan
Politeknik STIA LAN Jakarta

Jakarta, 15 September 2023

Yth. Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan
Badan Pengawas Obat dan Makanan
Jl. Percetakan Negara No 23
Jakarta Pusat

Bersama ini dengan hormat kami informasikan, bahwa salah satu mahasiswa kami:

Nama : Didi Suryadi
NPM : 2243021030
Jurusan : Administrasi Publik
Program Studi : Administrasi Pembangunan Negara
Konsentrasi : Manajemen Keuangan Negara
Judul Tesis : Redesain Sistem Perencanaan dan Penganggaran untuk Penguatan Penganggaran Berbasis Kinerja di BPOM

akan melakukan penelitian dalam rangka penulisan Tesis di Instansi Bapak.

Sehubungan dengan itu, kami mohon kiranya Bapak berkenan memberi ijin dan membantu mahasiswa kami tersebut untuk mendapatkan bahan-bahan/data/informasi yang dibutuhkannya.

Demikian atas perkenan, bantuan dan kerjasama Bapak, kami ucapkan terima kasih.

a.n. Direktur
Wakil Direktur I Bidang Akademik,



Dr. Mala Sondang Silitonga, MA.

Tembusan:

1. Direktur Politeknik STIA LAN Jakarta;
2. Kajur/Sekjur Administrasi Publik;
3. Kaprodi/Sekprodi Magister Terapan.

SURAT KETERANGAN

NOMOR : PB.02.01.212.10.23.3509

Yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Denny Alan, S.Kom

NIP : 19760608 200003 1 001

Jabatan: Analis Anggaran Ahli Madya

Dengan ini menerangkan bahwa mahasiswa/pegawai,

Nama : Didi Suryadi, S.E

NIP : 19850510 201012 1 003

Jabatan: Analis Anggaran Ahli Muda

Telah melakukan penelitian dalam rangka penulisan tesis pada tanggal 23 September 2023 s.d 13 Oktober 2023 pada Biro Perencanaan dan Keuangan Badan POM dengan Judul Redesain Sistem Perencanaan Dan Penganggaran Untuk Penguatan Penganggaran Berbasis Kinerja di BPOM.

Surat keterangan ini diberikan untuk keperluan administrasi penyelesaian tugas akhir.

a.n. Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan

Analisis Anggaran Ahli Madya



Denny Alan, S.Kom